



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIC INDONESIA**

**RISALAH  
RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI V DPR RI  
DENGAN SEKRETARIS JENDERAL, INSPEKTUR JENDERAL, KEPALA  
BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI, KEPALA BADAN  
PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN, DAN DIRJEN PERHUBUNGAN  
UDARA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI**

- Tahun Sidang : 2021-2022  
Masa Persidangan : V  
Rapat Ke- :  
Jenis Rapat : RDP  
Sifat Rapat : Terbuka  
Hari, Tanggal : Senin, 27 Juni 2022  
Waktu : Pukul 13.00 s.d. 16.00 WIB  
Tempat : Ruang Rapat Komisi V DPR RI, (Ruang KK V)  
Gedung Nusantara DPR RI dan Secara Virtual Zoom  
*Cloud Meeting*
- Ketua Rapat : Lasarus, S.Sos., M.Si. (F-PDIP)-Ketua Komisi V DPR RI
- Acara : 1. Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2022 sampai bulan Mei 2022;  
2. Membahas rencana alokasi anggaran menurut fungsi, program, dan prioritas anggaran K/L Tahun Anggaran 2023 masing-masing Unit Eselon I.
- Sekretaris Rapat : Nunik Prihatin Budiastuti, S.H., Kabag Komisi V DPR RI
- Hadir : A. Anggota DPR RI:  
42 dari 55 orang Anggota dengan rincian:  
1. FRAKSI PDI-PERJUANGAN (F-PDIP)  
9 dari 11 orang Anggota  
1. Lasarus, S.Sos., M.Si.  
2. Bob Andika Mamana Sitepu, S.H.  
3. Mochamad Herviano  
4. Sukur H. Nababan, S.T.  
5. Ir. Sudjadi  
6. Sarce Bandaso Tandiasik, S.H., M.H.  
7. H. Irmadi Lubis  
8. Ir. Effendi Sianipar  
9. Harvey B. Malaihollo  
2. FRAKSI PARTAI GOLKAR (F-PG)  
6 dari 8 orang Anggota  
1. Ir. Ridwan Bae  
2. Drs. Hamka B Kady, M.S.

3. DR. H. Ali Mufthi, S.AG., M.Si.
4. H. Tubagus Haerul Jaman, S.E.
5. Muhammad Fauzi, S.E.
6. Ir. H. Anang Susanto, M.Si.

3. FRAKSI PARTAI GERINDRA  
(F-GERINDRA)  
7 dari 7 orang Anggota
  1. H. Andi Iwan Darmawan Aras, S.E., M.Si.
  2. Ir. Sumail Abdullah
  3. Sudewo, S.T., M.T.
  4. Iis Rosyita Dewi, S.Hum., M.M.
  5. Ir. Eddy Santana Putra, M.T.
  6. Drs. H. Mulyadi, M.MA.
  7. Hj. Novita Wijayanti, S.E., M.M.
4. FRAKSI PARTAI NASDEM (F-NASDEM)  
4 dari 6 orang Anggota
  1. Roberth Rouw
  2. Drs. H. Tamanuri, M.M.
  3. Drs. H. Soehartono, M.Si.
  4. Drs. Fadholi, M. Ikom.
5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN  
BANGSA (F-PKB)  
4 dari 6 orang Anggota
  1. H. Ruslan M. Daud
  2. H. Dedi Wahidi, S.Pd.
  3. Sofyan Ali, S.H.
  4. H. Syafiuddin, S.Sos.
6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (F-PD)  
5 dari 5 orang Anggota
  1. Dr. H. Irwan S.IP., M.P.
  2. H. Mohamad Muraz, S. H., M.M.
  3. drh. Jhonni Allen Marbun, M.M.
  4. Lasmi Indaryani, S.E.
  5. Ir. H. Ishak Mekki, M.M.
7. FRAKSI PARTAI KEADILAN  
SEJAHTERA (F-PKS)  
2 dari 5 orang Anggota
  1. Ir. H. Sigit Sosiantomo
  2. KH. Toriq Hidayat, Lc.
8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL  
(F-PAN)  
4 dari 5 orang Anggota
  1. H. A. Bakri H. M., S.E.

2. Athari Ghauthi Ardi
3. Hj. Hanna Gayatri, S.H.
4. H. Boyman Harun, S.H.

9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN  
PEMBANGUNAN (F-PPP)

1 dari 2 orang Anggota

1. Dr. H. Muh Aras, S.Pd., M.M.

B. UNDANGAN:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan RI (Ir. Novie Riyanto Rahardjo, MSEA.)
2. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan RI (DR. Gede Pasek Suardika, M.Sc.)
3. Kepala Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan RI (Dr. Umar Aris, S.H., M.M., M.H.)
4. Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan Kementerian Perhubungan RI (Dr. Ir. Djoko Sasono, M.Sc. (Eng))
5. Plt. Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan RI (Ir. Nur Isnin Istiartono, M.Si.)

**JALANNYA RAPAT:**

**KETUA RAPAT-F- PDIP (LASARUS, S.Sos., M.Si.)-KETUA KOMISI V DPR RI:**

Bapak-Ibu sekalian kita mulai rapat kita pada siang hari ini,

***Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh,***  
**Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua,**

**Yang saya hormati Pimpinan dan teman-teman Anggota Komisi V,  
Yang saya hormati, Pak Sekjen, Pak Irjen, Kepala BPSDM, Dirjen Perhubungan Udara, dan Kepala, sorry, Kepala Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan, beserta seluruh jajarannya,  
Hadirin yang berbahagia,**

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul pada siang hari ini untuk melaksanakan rapat sesuai dengan jadwal yang sudah kita sampaikan.

Rapat ini dihadiri secara fisik maupun virtual, data yang sampai kepada kami dari Sekretariat hadir 35 Anggota, 15 hadir secara fisik dan 20 orang hadir secara virtual dari 9 unsur fraksi yang berbeda. Maka sesuai ketentuan, maka rapat ini sudah memenuhi kuorum dan sesuai dengan ketentuan Pasal 276

ayat (1) Peraturan DPR RI, maka rapat ini saya buka dan saya nyatakan terbuka untuk umum.

### **(RAPAT DIBUKA PUKUL 13.00 WIB)**

Kami ucapkan terima kasih kepada Sekjen, Irjen, Kepala Badan Kebijakan Transportasi, Dirjen Perhubungan Udara, dan Kepala BPSDM Kementerian Perhubungan yang telah hadir, menghadiri undangan kami untuk kita bersama-sama membahas pada rapat dengar pendapat kali ini sesuai materi yang sudah kita sampaikan.

#### **Hadirin yang berbahagia,**

Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri Perhubungan pada hari Rabu, tanggal 7 Juni yang lalu, telah disepakati beberapa hal di antaranya Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2022 Kementerian Perhubungan adalah sebesar 33,021 Triliun. Dari alokasi Pagu Indikatif tersebut, alokasi anggaran untuk Sekretariat Jenderal adalah sebesar 541,1 Miliar. Anggaran tersebut akan digunakan untuk mendukung kegiatan antara lain:

- Pengalokasian belanja pegawai di lingkungan Sekjen,
- Teknis perencanaan di lingkungan Kementerian Perhubungan dan
- Pemantauan atau *monitoring*; dan
- Evaluasi pelaksanaan anggaran.

Selanjutnya, Inpektorat Jenderal mendapatkan alokasi sebesar 96,6 Miliar yang dipergunakan untuk mendukung kegiatan antara lain:

- Pengawasan *internal*,
- Dukungan teknologi dan sistem transportasi, serta
- Peningkatan kompetensi keahlian.

Sedangkan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDM) memperoleh alokasi sebesar 3,66 Triliun yang akan dipergunakan untuk mendukung kegiatan di antaranya:

- Peningkatan diklat teknis darat, laut, dan udara,
- Peningkatan layanan SDM aparatur, dan
- Peningkatan layanan berbasis teknologi informasi.

Kemudian, Badan Penelitian dan Pengembangan mendapatkan alokasi sebesar 160,8 Miliar yang akan dipergunakan untuk mendukung kegiatan penelitian strategis yang mendukung program prioritas nasional di sektor perhubungan.

Sementara, Dirjen Perhubungan Udara mendapatkan alokasi anggaran sebesar 19,9 Triliun yang akan dipergunakan untuk:

- Program keselamatan dan keamanan penerbangan
- Pelayanan masyarakat, dan
- Program jembatan udara, serta
- Dukungan konektivitas dalam rangka pemulihan ekonomi nasional.

Selanjutnya, dengan itu dalam kesempatan ini kami tegaskan kembali agar dalam proses penyusunan Pagu Anggaran Tahun 2023 agar tiap-tiap unit organisasi Eselon I benar-benar dapat memperhatikan dan mengakomodir saran dan masukan dari Komisi V DPR RI yang disampaikan dalam seluruh rangkaian rapat kerja dan rapat dengar pendapat yang telah kita laksanakan sampai dengan hari ini.

Selanjutnya, terdapat beberapa hal yang perlu kami pertegas kembali dalam rapat kali ini, ya. Permasalahan-permasalahan strategis yang perlu kita tindaklanjuti dari Sekjen, Irjen, Kepala BPSDM, dan Kepala Badan Kebijakan Transportasi antara lain:

1. Perlu adanya peningkatan koordinasi baik secara *internal* maupun eksternal agar terwujud pola kerja yang lebih efektif dan efisien.
2. Perlu peningkatan pengawasan *internal* dalam rangka meminimalisir temuan dan permasalahan dalam penggunaan anggaran.
3. Perlunya meningkatkan kualitas sumber daya manusia perhubungan untuk mewujudkan aparatur sipil negara yang dapat mengembangkan inovasi dan profesionalitas secara berkesinambungan dan berintegritas.
4. Perlunya peningkatan jumlah penelitian dan pengembangan yang dapat mewujudkan solusi konkrit untuk berbagai persoalan transportasi di Indonesia.

Demikian, pengantar rapat pada siang hari ini, selanjutnya untuk mempersingkat waktu, saya persilakan untuk menyampaikan paparan masing-masing. Yang pertama dimulai oleh Sekjen, saya persilakan.

**SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI (Ir. NOVIE RIYANTO RAHARDJO, MSEA.):**

Terima kasih, Bapak Ketua,  
*Bismillahirrahmanirrahim,*

***Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh,***  
**Selamat siang salam sejahtera untuk kita semua,**  
**Om swastiastu,**  
**Namo buddhaya,**  
**Salam kebajikan,**  
**Salam kebangsaan,**  
**Salam Pancasila, dan**  
**Salam sehat,**

**Yang terhormat Bapak Ketua, Para Wakil Ketua dan Anggota Komisi V DPR RI serta hadirin yang berbahagia,**

Puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan nikmat-Nya sehingga kita dapat bertemu kembali pada Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI dengan Kementerian Perhubungan dengan agenda evaluasi pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2022 dan Rencana Alokasi Anggaran Tahun 2023.

Sebagaimana jadwal yang telah ditetapkan pada minggu sebelumnya, telah dilaksanakan Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri Perhubungan pada tanggal 7 Juni 2022 dan Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI dengan Eselon I pada tanggal 8 Juni 2022 dengan unit kerja Dirjen Perhubungan Darat, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, Dirjen Perhubungan Laut, dan Dirjen Perkeretaapian. Dan, pada hari ini dilaksanakan rapat dengar pendapat dengan Eselon I unit kerja Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Badan Kebijakan Transportasi, Badan Pengembangan SDM Perhubungan dan Dirjen Perhubungan Udara.

Selanjutnya, izinkanlah kami menyampaikan penjelasan secara garis besar materi rapat pada hari ini dengan sistematika sebagai berikut:

1. Evaluasi pelaksanaan APBN 2022 sampai bulan Mei 2022.
2. Pagu Indikatif Sekretariat Jenderal Tahun Anggaran 2023.

**Bapak Ketua, Wakil Ketua, dan Para Anggota Komisi V DPR RI yang kami hormati,**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 67 Tahun 2021 mengenai organisasi dan tata kerja Kementerian Perhubungan. Sekjen merupakan salah satu unit organisasi di lingkungan Kementerian Perhubungan yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Perhubungan. Dan, untuk melaksanakan tugas tersebut, tugas dan fungsi yang dimaksud. Sekretariat Jenderal terdiri dari 12 satuan kerja unit Eselon II. Antara lain:

- Biro Perencanaan,
- Biro Kepegawaian dan Organisasi,
- Biro Keuangan,
- Biro Hukum,
- Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara,
- Biro Umum,
- Biro Komunikasi dan Informasi Publik,
- Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Perhubungan,
- Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan,
- Pusat Fasilitas Kemitraan dan Kelembagaan *Internasional*,
- Mahkamah Pelayaran serta Komite Nasional Keselamatan Transportasi.

Eksistensi Sekretariat Jenderal menjadi sangat penting dan strategis mengingat fungsinya mengkoordinasikan dan melakukan pembinaan di ruang lingkup Kementerian dalam bidang perencanaan, keuangan, kepegawaian,

pengelolaan aset, kerjasama *internasional*, publikasi, dan dokumentasi dan teknologi transportasi.

**Bapak Ketua, Wakil Ketua, dan Para Anggota Komisi V DPR RI yang kami hormati,**

Terkait realisasi anggaran Sekjen Tahun Anggaran 2022 sebelumnya dapat kami kemukakan bahwa Pagu alokasi awal Sekjen Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar 505,37 Miliar. Kemudian, dengan adanya kebijakan *automatic adjustment* sebesar 10,107 Miliar dan terdapat tambahan *automatic adjustment* sebesar 27,133 Miliar sehingga Pagu akhir efektif saat ini yaitu sebesar 468,12 Miliar.

Posisi tanggal 31 Mei 2022, capaian realisasi keuangan Sekjen adalah sebesar 167,52 Miliar atau 33,15% dari total Pagu dengan rincian belanja pegawai telah terserap sebesar 41,8%, belanja barang sebesar 31,7% dan belanja modal 13,5%. Meskipun sampai dengan periode Mei 2022 diperbandingkan antara target dengan realisasi terdapat deviasi sebesar 4,99%. Namun, kami tetap optimis di penghujung akhir Tahun 2022 dapat mencapai target penyerapan anggaran sebesar 98,01%. Dan, dapat kami laporkan bahwa posisi per 23 Juni 2022, capaian realisasi adalah sebesar 198,7 Miliar atau 39,32%.

Selanjutnya, capaian realisasi PNBPN Sekretariat Jenderal sampai dengan periode Mei 2022 sebesar 2,527 Triliun atau 75,3% dari target PNBPN yang telah ditetapkan. Sumber belanja PNBPN saat ini merupakan salah satu pilar dari APBN merupakan salah satu pilar dalam APBN di tengah keterbatasan fiskal akibat dari perekonomian global yang *volatil*. Selain itu capaian PNBPN juga merupakan cerminan dari kinerja unit kerja dalam mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki serta implementasi, kreativitas, dan jiwa kewirausahaan guna terwujudnya *entrepreneur* birokrasi.

**Bapak Ketua, Bapak Wakil Ketua, dan Para Anggota Komisi V DPR RI yang kami hormati,**

Sesuai dengan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor S.353/MK/02/2022 dan Nomor B301M.PPN/D.8/PP.04.02/04/2022 tanggal 18 April 2022, Pagu Indikatif yang diterima Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2023 adalah sejumlah 33,021 Triliun dengan rincian sebagai berikut:

1. Berdasarkan jenis belanja:
  - Belanja pegawai: 3,8 Triliun
  - Belanja barang operasional: 3,3 Triliun
  - Belanja barang non-operasional: 25,8 Triliun
  
2. Berdasarkan sumber pendanaan:
  - Rupiah murni: 18,2 Triliun
  - Penerimaan Negara Bukan Pajak: 3,5 Triliun
  - Badan Layanan Umum: 1,4 Triliun

- Pinjaman Luar Negeri: 0,9 Triliun
- Surat Berharga Syariah Negara (SBSN): 8,7 Triliun

Sesuai dengan rincian dan alokasi yang ditetapkan, jumlah Pagu Indikatif Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan adalah sebesar 541,154 Miliar atau sekitar 1,64% dari total Pagu Indikatif Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2023.

Sesuai dokumen rencana strategis Sekjen, kebutuhan anggaran adalah sebesar 956,352 Miliar dan dalam perjalanannya pada penyusunan Pagu Kebutuhan diajukan anggaran sebesar 1,353 Triliun dan Pagu Indikatif yang ditetapkan adalah sebesar 541,154 Miliar. Adapun rincian Pagu Indikatif Sekjen Tahun 2023 berdasarkan jenis belanja yaitu:

1. Belanja pegawai: 123,61 Miliar
2. Belanja barang operasional: 169,06 Miliar
3. Belanja barang non-operasional: 248,47 Miliar

Target PNBK Sekjen Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar 3,092 Miliar dari total PNBK keseluruhan Kementerian Perhubungan sebesar 8,562 Triliun. Adapun prognosa PNBK Sekjen Tahun 2023 diproyeksikan tercapai 100%.

Oleh karena itu, kami akan terus meningkatkan dan mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan tersebut di antaranya yaitu pemanfaatan aset barang milik negara di lingkungan Sekjen dan Kementerian Perhubungan.

**Bapak Ketua, Wakil Ketua, dan Para Anggota Komisi V DPR RI yang kami hormati,**

Dengan menetapkan keberhasilan suatu tujuan dari sasaran strategis maka diperlukan adanya pengukuran dari indikator kinerja Tahun 2021. Tahun 2023 Sekjen telah menetapkan target indikator kinerja yaitu:

- Indeks reformasi hukum dengan nilai 75
- Nilai SAKIP Kementerian Perhubungan dengan nilai 78
- Indeks maturitas SPIP Kementerian Perhubungan dengan nilai 3,5
- Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa dengan nilai 75
- Indeks pengelolaan aset Kemenhub dengan nilai 70
- Kualitas pelaksanaan kerjasama dan kemitraan Kemenhub dengan nilai 86
- Indeks tata kelola manajemen ASN Kemenhub dengan nilai 0,96
- Reputasi positif Kementerian Perhubungan dengan nilai 76
- Indeks SPB Kementerian Perhubungan dengan nilai 3,96
- Rekomendasi hasil investigasi kecelakaan transportasi yang ditindaklanjuti *stakeholder* sebesar 56%
- Tingkat pemanfaatan rekomendasi hasil putusan sidang Mahkamah Pelayaran sebesar 71%
- Prosentase penurunan emisi gas rumah kaca sektor transportasi sebesar 5,13 juta ton CO<sub>2</sub> pada Tahun 2024 sebesar 89,96%



Dalam rangka mewujudkan tercapainya kinerja dan rencana strategis guna menghasilkan *output* yang diharapkan maka kami menyusun beberapa prioritas kegiatan strategis Sekjen Tahun Anggaran 2023, yaitu:

- Biro Perencanaan: alokasi 24,39 Miliar yang meliputi *monitoring* dan evaluasi terhadap kebijakan tarif, dokumen RKA K/L dan DIPA Kementerian Perhubungan, penyusunan kajian pendahuluan penyusunan RPJP sektor perhubungan untuk 2025-2045 dan penyusunan LAKIP dan penetapan kinerja Kementerian Perhubungan.
- Biro Keuangan: alokasi 19,21 Miliar yang meliputi pemantauan ataupun *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan anggaran, pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan, pembinaan *monitoring* dan evaluasi serta penyusunan target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
- Biro Kepegawaian dan Organisasi: alokasi 21,32 Miliar yang mencakup rekrutmen dan pengangkatan pegawai, asesmen kompetensi jabatan atau pegawai di lingkungan Kementerian Perhubungan, peningkatan kompetensi SDM aparatur melalui program pendidikan S2 dalam negeri, pemantauan dan evaluasi reformasi birokrasi serta penerimaan aparatur sipil negara berbasis *daring* dan *Computer Assisted Test (CAT)*.
- Biro Hukum: alokasi 12,5 Miliar yang mencakup penyusunan regulasi di bidang transportasi, uji petik tentang regulasi dan peraturan pelaksanaannya di bidang transportasi serta pemberian advokasi hukum di lingkungan Kementerian Perhubungan.
- Biro LPP BMN: alokasi 22,79 Miliar yang meliputi *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang jasa, pelaksanaan pemilihan penyediaan barang jasa, pembinaan *monitoring* inventarisasi, evaluasi dan verifikasi pengelolaan BMN di lingkungan Kementerian Perhubungan, serta pengasuransian aset gedung di lingkungan Kementerian Perhubungan.
- Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Publik: alokasi 27,37 Miliar yang meliputi kegiatan komunikasi publik melalui pemanfaatan media sosial dan jejaring komunikasi, pelaksanaan kegiatan komunikasi dan informasi publik melalui pemberitaan, pelaksanaan kegiatan komunikasi dan informasi publik melalui edukasi publik.
- Biro Umum: Alokasi 245,23 Miliar yang meliputi pengadaan dan pemasangan pembangkit listrik tenaga surya di lingkungan Kemenhub, pemeliharaan, perawatan peralatan mesin kantor pusat, penyelenggaraan operasional pengamanan khusus dan satuan pengamanan serta pengalokasian belanja pegawai di lingkungan Sekjen.

- Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Perhubungan: alokasi 63,31 Miliar yang mencakup penyusunan kaji ulang arsitektur SPB dan peta rencana SPB instansi pusat Kementerian Perhubungan, pembinaan layanan operasional sistem teknologi informasi dan komunikasi, *upgrade server HCI data center* Kementerian Perhubungan, pengembangan sistem informasi dan integrasi, persiapan dan audit *surveillance*, perluasan ruang lingkup, *upgrade* versi ISO 27001-2022, layanan TIK serta membangun *command center*.
- Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan (PPTB): alokasi 13,5 Miliar yang meliputi penyiapan pengelolaan kebijakan lingkungan hidup, dampak sektor transportasi, adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim serta penyiapan pengelolaan kebijakan peningkatan sistem dan inovasi pelayanan transportasi.
- Pusat Fasilitas Kemitraan dan Kerjasama *Internasional* (PFKKI) dan atase Perhubungan: alokasi 32,72 Miliar yang mencakup kerja sama kemitraan dengan instansi Pemerintah Pusat dan Daerah, BUMN, Swasta dan Masyarakat KPBU. Pelayanan kerjasama luar negeri dalam rangka regional, sub-regional, bilateral dan multilateral, serta bantuan delegasi RI ke sidang nasional dan *internasional* dan perwakilan Kementerian Perhubungan di luar negeri atau atase perhubungan.
- Mahkamah Pelayaran: alokasi 18,94 Miliar yang meliputi verifikasi dan penelitian informasi, data awal kecelakaan kapal, sidang majelis pemeriksaan lanjutan kecelakaan, serta peningkatan kapasitas SDM hakim dan Anggota.
- Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT): alokasi 40,05 Miliar yang meliputi pelaksanaan investigasi transportasi, *monitoring* rekomendasi keselamatan transportasi, pengadaan aplikasi pengolah data pendukung *flight data recorder* laboratorium *blackbox*, kerja sama investigasi keselamatan transportasi, rilis media KNKT dan penyusunan norma standar prosedur dan kriteria investigasi keselamatan transportasi.

**Bapak Ketua, Wakil Ketua, dan para Anggota Komisi V DPR RI yang kami hormati,**

Dalam kesempatan yang berharga ini, juga kami sampaikan bahwa Kementerian Perhubungan berkomitmen dalam melaksanakan keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Dan, berdasarkan hasil monitoring dari LKPP yang telah disampaikan dalam forum bisnis *matching* belanja PDN tahap 3 pada tanggal 30-31 Mei 2022. Untuk realisasi produk dalam negeri atau PDN Kementerian Perhubungan adalah sebesar 8,3 Triliun dengan target sebesar 20,5 Triliun di Tahun 2022.

Demikian yang dapat saya sampaikan, perkenankanlah kami menghaturkan permohonan dukungan, saran, serta masukan Pimpinan beserta Anggota Dewan yang terhormat guna penyempurnaan, penyusunan rencana kerja dan anggaran khususnya dalam rangka peningkatan capaian kinerja merupakan wujud kolaborasi kemitraan antara Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan dengan Komisi V DPR RI.

Kami tentunya mengharapkan bahwa target kinerja yang direncanakan dapat berkontribusi dalam penyelenggaraan layanan transportasi yang lebih baik untuk masyarakat. Kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan yang tidak berkenan.

Sekian dan terima kasih,

*Wasalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh.*

Salam sejahtera bagi kita semua.

Om santi santi om, namo buddhaya, dan salam kebajikan.

**F- P. GOLKAR (Ir. RIDWAN BAE) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:**

Makasih Pak Sekjen, ya singkat-singkat ya karena tadi sudah dibaca juga sebagian kita. Berikutnya Pak Irjen, silakan Pak Irjen.

**INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (DR. Gede Pasek Suardika, M.Sc.):**

Terima kasih Pak Ketua.

***Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh,***

**Selamat siang salam sejahtera untuk kita semua,**

**Shalom,**

**Om swastiastu,**

**Namo buddhaya,**

**Salam kebajikan dan salam kebangsaan,**

**Salam sehat buat kita semua,**

**Yang terhormat Bapak Ketua, Para Wakil Ketua, dan Anggota Komisi V DPR RI,**

**Serta hadirin yang berbahagia,**

**Yang saya hormati Pak Sekjen, Pak para Kepala Badan, dan Pak Dirjen Perhubungan Udara,**

Pada hari yang bahagia ini izinkan kami juga mengajak kita semua untuk mari kita mulai memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat rahmat-Nya kita bisa hadir pada hari yang berbahagia ini dalam rangka membahas evaluasi pelaksanaan APBN Tahun 2022 sampai dengan bulan Mei dan rencana alokasi anggaran menurut fungsi program dan prioritas anggaran Tahun 2023.

Selanjutnya, mohon izin kami menyampaikan penjelasan beberapa hal yang penting, berkaitan dengan rencana alokasi anggaran Tahun 2023 Inspektorat Jenderal sebagai berikut:

Tahun Anggaran 2022 Inspektorat Jenderal mendapat alokasi anggaran awal sebesar 87,6 Miliar dan selama pelaksanaan anggaran berjalan Tahun 2022 alokasi anggaran Inspektorat Jenderal mengalami perubahan atau penambahan sebesar 9,9 Miliar. Sehingga, alokasi anggaran Inspektorat Jenderal tersebut menjadi 97,9 Miliar dengan rincian rekomposisi penambahan belanja pegawai sebesar 44,6 Miliar, penambahan belanja barang operasional untuk pencegahan Covid sebesar 5,2 Miliar.

Sebagaimana kebijakan Pemerintah Tahun Anggaran 2022 terkait pencadangan anggaran atau disebut dengan *automatic adjustment* yang dilakukan melalui pencatatan halaman 4 Dipa atau *self blocking* alokasi anggaran Inspektorat Jenderal juga dilakukan *automatic adjustment*.

Pada *automatic adjustment* jilid I sebesar 3,5 Miliar bersumber dari belanja pegawai pada komponen gaji ke-13 dan Tunjangan, THR sebesar 3,3 Miliar dan paket *meeting* perjalanan dinas sebesar 200 Juta.

Dan, pada *automatic adjustment* jilid ke-2 sebesar 7,4 Miliar yang bersumber dari belanja barang non-operasional pada komponen belanja dinas sebesar 5,3 Miliar dan paket *meeting* sebesar 1,4 Miliar serta sisa kontrak dan efisiensi belanja modal sebesar 684 Juta. Sehingga total anggaran Itjen yang dapat direalisasikan setelah dikurangi *automatic adjustment* sebesar 86,5 Miliar.

**Bapak Ketua, Wakil Ketua, dan para Anggota Komisi V DPR RI yang kami hormati,**

Sampai dengan posisi tanggal 31 Mei 2022, realisasi anggaran Inspektorat Jenderal sudah sebesar 32,11% dan sampai dengan tanggal 15 Juni 2022 ini realisasi anggaran telah mencapai 35,36%. Dan, jika memperhitungkan angka *outstanding* sebesar 6,1% sehingga pada minggu kedua Juni, tahun anggaran ini sudah mencapai 41,5%.

Target, Tahun 2022 penyerapan anggaran kami sebesar 96,6%, dengan keterbatasan pendanaan dan adanya kebijakan *automatic adjustment* maka strategi dan upaya pengawasan *intern* dilakukan melalui pemetaan resiko terhadap objek pengawasan yang memiliki resiko tinggi dan yang akan mungkin menghambat pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Serta strategi keduanya adalah memerankan teknologi informasi melalui *remote* audit dan juga digitalisasi pengawasan. Jadi itu bagaimana kami mensiasati keterbatasan anggaran.

Sampai dengan bulan Mei 2022 realisasi capaian kinerja *output* pengawasan *intern* baik *insurance* atau *consulting* yang meliputi audit *review* evaluasi pemantauan pengawasan lainnya sebesar 80%. Dan, sampai dengan tanggal 15 Juni ini sudah terdapat sebanyak 8,6% sehingga capaian kinerja

*output* pengawasan *intern* pada minggu kedua Juni 2022 sudah mencapai 88,6%.

**Bapak Ketua, Wakil Ketua, dan para Anggota Komisi V DPR RI yang kami hormati,**

Kami mengucapkan terima kasih dan atas dukungan dan bimbingan para Pimpinan dan Anggota Komisi V dalam meningkatkan alokasi anggaran pengawasan *intern*. Sehingga alokasi anggaran pengawasan *intern* itu rata-rata sebesar 0,2 sampai 0,28% dari Pagu Kementerian Perhubungan.

Berdasarkan surat bersama Kepala Bappenas dan Menteri PPN & Menteri Keuangan tanggal 18 April 2022 perihal Pagu Indikatif belanja Kementerian/Lembaga Tahun 2023 dan Surat Sekjen Kemenhub Nomor 001 Tanggal 27 Mei 2022, Inspektorat Jenderal mendapat alokasi anggaran Pagu Indikatif sebesar 96,6 Miliar atau sebesar 0,29% dari total Pagu anggaran Kementerian Perhubungan yang sebesar 33,2 Triliun.

Alokasi Pagu Indikatif Inspektorat Jenderal tersebut masih di bawah Pagu kebutuhan yang kami usulkan awalnya sebesar 181 Miliar. Adapun rincian komposisi anggaran Inspektorat Jenderal Tahun 2023 adalah sebagai berikut. Untuk belanja pegawai sebesar 38,8 Miliar, ini sekitar 40% dari total Pagu, ini untuk belanja gaji dan tunjangan pegawai sebesar 281 pegawai.

Kemudian, belanja barang operasional, atau mengikat sebesar 5,9% ini sekitar 6% antara lain untuk belanja pemeliharaan, pengadaan paket dinas, langganan daya, honorarium, dan juga perawatan sarana kantor.

Kemudian, belanja barang non-operasional itu sebesar 47%, saya ulangi 47 Miliar atau 48% yang terdiri dari 27,2 Miliar atau 28% untuk pelaksanaan tugas-tugas pengawasan dan 19,8 Miliar atau 20% untuk pengembangan SDM. Dalam hal ini juga untuk peningkatan sertifikasi auditor dan juga untuk dukungan teknologi informasi pengawasan, kemitraan bekerja sama bidang pengawasan dan tata kelola pengawasan *intern*.

Kemudian belanja modal itu sebesar 4,7 Miliar atau 4,8% antara lain untuk pengadaan peralatan digital forensik, peralatan alat sarana alat bantu audit, perlengkapan sarana kantor dan pengembangan sistem informasi pengawasan.

**Bapak Ketua, Wakil Ketua, dan para Anggota Komisi V DPR RI yang kami hormati,**

Sebagai aparat pengawas *intern* Pemerintah atau (APIP) maka Inspektorat Jenderal terus berupaya meningkatkan fungsi sebagai pengawas *intern* dalam rangka memperkuat peran Irjen sebagai *strategic partner* dan *trusted advisor* melalui pola-pola pengawasan yang bersifat *assurance* dan *consulting* dengan mengoptimalkan peran-peran pemberian pandangan (*insight*) dan pemberian solusi (*forsight*) terhadap kegiatan yang sifatnya

*strategic*, direktif, dan menjadi prioritas Kementerian Perhubungan sehingga dapat ter-*delivery* atau tersampaikan dengan baik.

Ruang lingkup daripada pengawasan Inspektorat Jenderal ini meliputi 582 objek pengawasan baik dari kantor pusat maupun UPT-UPT daerah dengan 30.000 pegawai Kemenhub, alokasi APBN Kementerian Perhubungan sebesar 3,29 Triliun dengan potensi penerimaan PNPB BLU sebesar 8,51 Triliun dan 40 proyek strategis nasional, 254 proyek prioritas nasional serta 2.650 proyek prioritas strategis di lingkungan Kementerian Perhubungan. Inilah areal daripada pengawasan yang harus kami lakukan pengawasan secara cermat.

**Bapak Ketua, Wakil Ketua dan para Anggota Komisi V DPR RI yang kami hormati,**

Saya kira demikian penjelesan umum yang dapat kami sampaikan, selanjutnya kami mohon berkenan Bapak Ketua dan Pimpinan dan Para Anggota untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada kita semua.

Terima kasih.

*Wassalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh,*  
Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua,  
Shalom, om santi-santi om.

**F- P. GOLKAR (Ir. RIDWAN BAE) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:**

Pak Irjen terima kasih, singkat, padat dan dimengerti betul. Berikutnya dari Kepala BPSDM silakan, Pak.

**KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN  
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI (DR. IR. DJOKO SASONO, M.Sc.  
(ENG):**

*Bismillahirrahmanirrahim.*

**Yang terhormat Pimpinan dan Para Anggota Komisi V DPR RI,  
Hadirin sekalian,**

***Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh,*  
Selamat siang salam sejahtera bagi kita semua,  
Om swastiastu,  
Namo buddhaya,  
Salam kebajikan,  
Salam kebangsaan,  
Salam pancasila,  
Salam sehat,**

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa kita bersama menghadiri rapat dengar pendapat

dengan Komisi V DPR RI. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan Pimpinan dan Anggota Komisi V DPR RI yang terhormat yang turut menyukseskan program bimbingan dan juga pelaksanaan kegiatan kami baik di masyarakat maupun di wilayah kerja dengan salah satunya memberikan (suara kurang jelas) baik dalam kunjungan kerja maupun menghadiri kegiatan lainnya.

**Pimpinan dan para Anggota Komisi V DPR RI yang terhormat,**

Izinkan kami melaporkan bahwa rapat dengar pendapat ini juga dihadiri oleh para pejabat lingkungan BPSDM baik Kepala Pusat, Sekretaris juga para Kepala atau Pimpinan sekolah di lingkungan Kementerian Perhubungan yang mana hadir secara virtual.

**Pimpinan dan para Anggota Komisi V DPR RI yang terhormat,**

Dalam Tahun Anggaran 2022, izinkan kami melaporkan bahwa secara kronologis, Pagu awal BPSDM Perhubungan sebesar Rp3,771 Triliun. Selanjutnya terdapat penambahan Pagu sebesar 22,64 Miliar rupiah yang berasal dari penggunaan saldo awal BLU pada tiga Satker BLU. Sehingga Pagu BPSDM Perhubungan menjadi Rp3,794 Triliun dengan komposisi sebagai berikut.

Secara per belanja yaitu belanja sebesar 347 Miliar atau 9,15%, belanja barang operasional sebesar Rp752,9 Miliar atau 19,84%. Belanja non-operasional sebesar Rp2,092 Triliun atau 55,16%. Belanja modal sebesar Rp601,1 Miliar atau setara dengan 15,85%.

Berdasarkan sumber dana, sumber dana berupa rupiah murni sebesar Rp2,422 Triliun atau 63,84%. Kemudian belanja berdasarkan PNBPN atau (suara kurang jelas) Rp1,312 Triliun atau 34,58%. Dan SBSN sebesar 60 Miliar atau 1,58%.

Telah dilakukan proses *automatic adjustment* sebanyak dua kali di mana anggaran yang diambil di dana rupiah murni dengan total anggaran sumber dana rupiah murni sebesar Rp2,42 Triliun dengan rincian *automatic adjustment* yang telah dilakukan sebagai berikut: *automatic adjustment* tahap 1 sebesar Rp121,1 Miliar, *automatic adjustment* tahap 2 sebesar Rp59,3 Miliar dengan total *automatic adjustment* sebesar Rp180,4 Miliar.

**Pimpinan dan para Anggota Komisi V DPR RI yang terhormat,**

Dapat kami sampaikan bahwa dengan total Pagu akhir BPSDM sebesar 3,794 Triliun rupiah di mana target sampai bulan ini sebesar Rp878 Miliar atau setara 25,30% dan telah terealisasi sebesar Rp834 Miliar atau 22% dengan rincian realisasi anggaran tersumber dana adalah sebagai berikut: Untuk rupiah murni sebesar Rp627 Miliar atau 25,91%, PNBPN BLU sebesar Rp207,1 Miliar atau 15,79%. Berdasarkan per jenis belanja, belanja pegawai sebesar Rp127 Miliar atau 11,8%. Belanja barang sebesar Rp614,9 Miliar atau 79,13%. Dan belanja modal sebesar Rp92,5 Miliar atau 8,89%.

BPSDM Perhubungan akan terus mengejar percepatan kegiatan-kegiatan yang telah ditentukan baik dari sisi peningkatan layanan maupun percepatan, proses akuntabilitas dokumen penganggaran sehingga target penyelenggaraan pada akhir tahun anggaran, Tahun 2022 sebesar 95,14% dapat tercapai.

Dapat kami laporkan juga bahwa pada Tahun Anggaran 2022 capaian realisasi penerimaan PNBPN atau BLU BPSDM Perhubungan per 31 Mei 2022 sebesar 29,28%. Capaian didominasi oleh matra laut sebesar 36,8%, matra udara sekitar 18,1%, matra darat sebesar 13,53% dan non-matra sebesar 4,38%.

### **Pimpinan serta para Anggota Komisi V DPR RI yang terhormat,**

Dapat kami sampaikan pula bahwa dalam upaya pencapaian target indikator kinerja program yang terdapat dalam rencana strategis BPSDM Perhubungan, perlu kami sampaikan capaian Indikator Kinerja Program (IKP) Tahun 2022 sebagai berikut:

- Capaian indikator kinerja kegiatan 1: jumlah peserta diklat sebanyak 161,320 peserta (47,52%)
- Capaian indikator kinerja kegiatan 2: persentase peserta diklat yang bersertifikat sebesar (44,85%)
- Capaian indikator kinerja kegiatan 3: persentase penyerapan lulusan diklat, pembentukan (suara kurang jelas) sebesar (61,01%)
- Capaian indikator kinerja kegiatan 4: jumlah pengabdian masyarakat yang dilaksanakan sebesar 39 kegiatan. serta,
- Capaian indikator kinerja kegiatan 5: jumlah penelitian oleh tenaga pengajar yang dipublikasikan sebanyak 85 dokumen.

### **Pimpinan dan Anggota Komisi V DPR RI yang terhormat,**

Capaian kegiatan (suara kurang jelas) BPSDM Perhubungan tahun anggaran 2022 per tanggal 31 Mei 2022 antara lain:

- Capaian diklat vokasi sebesar 14,78%
- Capaian diklat pemberdayaan masyarakat sebesar 31,17%
- Capaian sarana dan prasarana prioritas nasional sebesar 16,25%
- Capaian sarana dan prasarana non-(suara kurang jelas) sebesar 13,01%
- Capaian kegiatan peningkatan sistem manajemen mutu, IT, kuliah umum, administrasi, dan lain-lain sebesar 22%.

Jadi, target BPSDM Perhubungan sebesar 1,871 Triliun dengan realisasi anggaran sebesar Rp321,5 Miliar (17,15%).

### **Pimpinan dan para Anggota Komisi V DPR RI yang terhormat,**

Terkait program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh BPSDM Perhubungan yaitu program diklat pemberdayaan masyarakat dan



program padat karya. Progres program BPM pada tanggal 31 Mei 2022 adalah sebagai berikut.

Target peserta sebanyak 81.923 peserta, dengan total alokasi anggaran sebesar Rp153,3 Miliar. Realisasi Tahun Anggaran 2022 sebanyak 38.087 peserta dengan total anggaran Rp36,7 Miliar atau mencapai 22,5% dari total target yang tersebar mulai dari Aceh sampai dengan Papua.

Izinkan, kami laporkan juga terkait realisasi program padat karya Tahun Anggaran 2022 terdiri dari 72 kegiatan yang tersebar pada 29 Satker di 15 provinsi dan mencapai 23 Kota Kabupaten dengan total Pagu kegiatan padat karya sebesar Rp13,6 Miliar atau sebesar 0,36% dari total Pagu.

### **Pimpinan dan para Anggota Komisi V yang terhormat,**

Selanjutnya, kami sampaikan program kerja BPSDM Perhubungan mengacu pada rencana kerja Pemerintah, RKP Tahun Anggaran 2023 khususnya pada Program Prioritas Nasional III tentang Peningkatan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing. Serta Program Prioritas Nasional V tentang Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar Pada Kegiatan Diklat Pemberdayaan Masyarakat.

Kronologis Pagu anggaran BPSDM Perhubungan Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut

Mulai dari Pagu kebutuhan sampai dengan Pagu alokasi indikatif sebesar Rp3,665 Triliun yang terdiri dari

- Program vokasi sebesar Rp2,494 Triliun
- Program dukungan manajemen sebesar Rp1,171 Triliun
- Anggaran pendidikan sebesar 2,44 Triliun.

Dengan rincian untuk program pendidikan dan pelatihan vokasi sebesar 2,494 Triliun (68,05%), untuk pendidikan transportasi 26 Satker sebesar Rp2,44 Triliun dan kegiatan program pengembangan SDM Perhubungan sebesar Rp50,51 Miliar

- Program dukungan manajemen sebesar Rp1,171 Triliun (31,95%) untuk kegiatan pengembangan SDM aparatur serta pengembangan SDM perhubungan.

Terkait dengan perbandingan besaran anggaran terdapat selisih penurunan anggaran dari Pagu Indikatif Tahun 2021 yaitu 3,78 Triliun dengan Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2022 sebesar 3,665 Triliun yang mengalami penurunan anggaran sebesar Rp112,9 Miliar. Hal tersebut terkait dengan penyusunan anggaran pada program dukungan manajemen dalam hal optimalisasi penggunaan sumber dana BLU dan kebutuhan operasional perkantoran yang efektif dan efisien.

Dengan komisi anggaran per belanja Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2023 antara lain:

- Belanja pegawai sebesar Rp325,5 Miliar (8,88%)
- Belanja barang operasional sebesar Rp610,7 Miliar (16,66%)
- Belanja barang non-operasional sebesar Rp2,048 Triliun (55,87%)
- Belanja modal sebesar Rp681,4 Miliar (18,59%)

Komposisi per sumber dana Pagu Indikatif Tahun 2023, antara lain:

- Rupiah murni sebesar Rp2,21 Triliun (60,33%),
- PNBPN sebesar 39 Miliar (1,07%),
- BLU sebesar Rp1,155 Triliun (31,51%), serta
- SBSN sebesar Rp260 Miliar (7,05%).

#### **Pimpinan dan Anggota Komisi V DPR RI yang terhormat,**

Dalam rangka memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pendukung diklat, BPSDM Perhubungan memiliki kegiatan pembangunan sarana dan prasarana yang bersumber dari SBSN Tahun Anggaran 2023 antara lain:

1. Pengembangan gedung penunjang akademik di PP Makassar sebesar Rp104,3 Miliar yang merupakan kegiatan *multiyears contract* dari Tahun Anggaran 2022 dengan total keseluruhan anggaran untuk pembangunan gedung penunjang akademik sebesar Rp164 Miliar.
2. Pembangunan gedung kelas di Poltrada Bali sebesar Rp41,1 Miliar yang merupakan usulan baru kegiatan SBSN Tahun 2023.
3. Pengadaan peralatan penunjang pendidikan vokasi di 6 Satker BPSDM Perhubungan dengan total anggaran sebesar Rp108,5 Miliar.

Sehingga total anggaran efisien Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp260 Miliar.

#### **Pimpinan dan Anggota Komisi V DPR RI yang terhormat,**

Dapat kami laporkan juga bahwa BPSDM Perhubungan tetap fokus dalam rangka menghasilkan penyediaan SDM yang berkualitas dengan melaksanakan kegiatan strategis dan melaksanakan prioritas anggaran BPSDM Perhubungan sebagai berikut:

- Kegiatan pendidikan dan pengajaran sebesar Rp580,4 Miliar
- Kegiatan perencanaan sebesar Rp51,4 Miliar
- Kegiatan pengabdian masyarakat sebesar Rp55,5 Miliar.

Sedangkan, untuk kegiatan Prioritas Nasional Tahun 2023 yang mendukung Prioritas Nasional III dan Prioritas Nasional V telah teranggarkan sebesar Rp1,571 Triliun, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

1. Pemenuhan bantuan pendidikan tinggi sebesar 37 orang senilai Rp2,3 Miliar
2. Pemenuhan diklat vokasi sejumlah 26.444 orang senilai Rp836,4 Miliar.
3. Pemenuhan diklat pemberdayaan masyarakat sejumlah 102.620 orang senilai Rp218,4 Miliar, serta
4. Pemenuhan sarana dan prasarana sejumlah 36 unit senilai Rp513,7 Miliar.

Serta total anggaran pemenuhan sarpras prioritas nasional maupun non prioritas nasional sebesar Rp681,4 Miliar (18,59) dari total Pagu BPSDM Perhubungan.

**Pimpinan dan Anggota Komisi V DPR RI yang terhormat,**

Kami laporkan sebaran (suara kurang jelas) Kementerian Perhubungan mulai dari wilayah barat sampai dengan timur sebanyak rincian Provinsi mulai dari Provinsi Nanggore Aceh Darussalam kemudian dan seterusnya.

Dapat kami laporkan juga sebaran belanja modal BPSDM Perhubungan di atas 10 Miliar dengan total anggaran pembangunan sarana prasarana. Serta selanjutnya program BPSDM yang menyentuh ke lapisan masyarakat lainnya adalah taruna pola pembinaan dengan total sebanyak 13.405 orang dan anggaran Rp452,4 Miliar.

**Pimpinan dan Anggota Komisi V DPR RI yang terhormat,**

Dapat kami sampaikan juga terkait program pemberdayaan masyarakat pada kegiatan padat karya dengan total anggaran sebesar 4,3 Miliar tersebar di 26 Satker serta sesuai dengan target sebaran sebagaimana yang kami laporkan di dalam peta dan tabel tersebut.

**Pimpinan dan Anggota Komisi V DPR RI,**

Demikianlah penjelasan yang dapat kami sampaikan terkait evaluasi pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2022 dan alokasi anggaran serta prioritas anggaran Tahun Anggaran 2023. Kami mohon dukungan dan masukan dari Pimpinan dan Anggota Komisi V yang terhormat, agar semua kami bisa lebih baik di tahun anggaran-anggaran berikutnya. Selanjutnya kami terima kasih pada Pimpinan, Anggota selama ini atas arahan-arahannya. Sekian dan terima kasih.

*Wassalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh.*  
Om santi santi om.

**F- P. GOLKAR (Ir. RIDWAN BAE) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:**

Terima kasih Pak. Berikutnya Pak Kepala Badan Kebijakan Transportasi, terakhir baru Pak Dirjen, Pak, ya.

**KEPALA BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI (DR. UMAR ARIS, S.H., M.M., M.H.):**

Terima kasih.

**Makasih Pak Wakil Ketua Komisi V DPR RI yang kami banggakan,  
Bapak-Ibu Anggota Komisi V DPR RI yang kami hormati,  
Pak Sekjen, Pak Irjen, Kepala BPSDM, dan**

**Para Pejabat di lingkungan Menteri Perhubungan yang hadir dan para hadirin yang saya hormati,**

***Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh,***  
**Selamat siang salam sejahtera bagi kita semua,**  
**Om swastiastu,**  
**Shalom,**  
**Namo budhaya,**  
**Salam kebajikan,**

Izinkan kami sesuai dengan agenda RDP pada hari ini untuk menyampaikan perihal evaluasi pelaksanaan APBN Tahun 2022 di Badan Litbang Perhubungan sampai bulan Mei 2022 dan rencana alokasi anggaran menurut fungsi, program dan prioritas anggaran Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2023.

**Bapak Pimpinan dan Bapak-Ibu Anggota Komisi V yang saya hormati,**

Tahun 2022 merupakan tahun transisi Badan Litbang Perhubungan menjadi Badan Kebijakan Transportasi. Sebagaimana telah terbit Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan yang di dalamnya adalah Badan Litbang Perhubungan sudah hilang menjadi Badan Kebijakan Transportasi karena adanya kebijakan tentang BRIN.

Proses transformasi kelembagaan masih berjalan sampai dengan saat ini di mana keputusan Menteri Perhubungan mengenai struktur organisasi dan tata kerja karena menyangkut juga institusi lainnya. Yang di dalamnya mengatur tugas dan fungsi unit kerja setingkat Eselon II ke bawah, Badan Kebijakan Transportasi juga masih dalam proses penetapan.

Selain itu, ada proses administrasi lain yang harus diselesaikan, di antaranya pembentukan satuan kerja, penetapan pejabat definitif termasuk penetapan alokasi anggaran sebagai BKT.

Dapat kami laporkan bahwa sebagaimana Perpres 23 Tahun 2022 Pasal 49, yang pada intinya unit kerja Balitbang saat ini masih ada tetap menjalankan tugas dan fungsi sampai dengan proses transisi selesai. Untuk itu sejak awal Tahun 2022 sampai dengan posisi saat ini kami tetap menjalankan fungsi untuk memberi dukungan analisis kebijakan strategis kepada Bapak Menteri Perhubungan.

Beberapa rekomendasi dan analisis yang telah BKT perbuat atau Badan Litbang perbuat, satu dukungan analisis perencanaan sistem Ibukota Negara. Yaitu berupa rancangan *grand design* sistem transportasi Ibukota Negara yang telah ditetapkan sebagai satu kesatuan bagian tidak terpisahkan dengan dokumen rencana induk IKN dalam Undang-Undang 3 Tahun 2022, itu prestasi yang artinya sudah kita lakukan.

Dua dukungan analisis kebijakan terhadap program angkutan pariwisata yang berkeselamatan. Di antaranya beberapa rekomendasi standar

operasional dan prosedur dengan fokus substansi itu berupa mekanisme pengendalian dan *law enforcement*. Rekomendasi ini sekaligus merespons masih banyaknya terjadi kecelakaan pada angkutan pariwisata. Kami juga menilai apakah, karena ini analisis kebijakan, apakah ada suatu pelanggaran walaupun tugas KNKT, tapi dari kebijakan kami menilai misalnya penggunaan pengemudi itu nggak boleh lebih dari 4 jam. Harus istirahat, harus diberdayakan, apakah hal-hal kebijakan ini juga ada yang perlu kami rekomendasikan.

Ketiga, dukungan analisis terhadap strategi kebijakan pengendalian mobilitas masyarakat pada masa angkutan lebaran Tahun 2022, *alhamdulillah* telah berjalan dengan lancar. Tentu telah kami sampaikan hasil penelitian yang akan membuat siapa berbuat apanya dan *alhamdulillah* telah selesai. Analisis yang kami lakukan menjadi dasar bagi terbitnya 11 regulasi dari kementerian/lembaga yang ditujukan untuk mengatur mobilitasi di dalam negeri, selain itu rekomendasi ini juga menjadi dasar terbitnya 4 regulasi dari 2 kementerian/lembaga yang mengatur mobilitas dari dan keluar negeri.

Keempat, selain itu BKT juga telah mentelaah dan menyampaikan analisa serta rekomendasi kebijakan terhadap sejumlah isu di antaranya perbaikan pelayanan terpadu pada angkutan penerbangan, perubahan kebijakan persyaratan perjalanan pada transportasi udara, rekomendasi untuk mengakselerasi proyek strategis nasional sektor transportasi, rekomendasi untuk mengakselerasi pinjaman luar negeri sektor transportasi, serta merekomendasi terhadap rancangan Tatravil tingkat Provinsi, Tata Transportasi Wilayah, sebagai perpanjangan kebijakan sektor transportasi.

### **Bapak Pimpinan dan Ibu Anggota Komisi V yang saya hormati,**

Kenapa saya dahulukan itu, di tengah-tengah kita masa transisi tetap kami melakukan sesuatu mencoba yang terbaik. Dapat kami laporkan juga posisi anggaran Badan Litbang Perhubungan tahun ini, komposisi anggaran Badan Litbang Perhubungan sesuai Dipa awal Tahun Anggaran 174,3 Miliar. Kemudian dalam perjalanannya mengalami perubahan komposisi yang diakibatkan adanya kebijakan blokir program riset dan inovasi Iptek yang diintegrasikan ke BRIN.

Kemudian adanya blokir yang, blokir oleh Kemenkeu yaitu *automatic adjustment* tahap 1 dan 2 sehingga total anggaran Badan Litbang yang terblokir adalah sebesar 76,4 Miliar (44%) dari total Dipa yang terdiri dari 64,2 Miliar blokir BRIN. 12,25 Miliar blokir akibat *automatic adjustment* tahap 1 dan 2. Sedangkan anggaran yang dapat dioptimalkan untuk menjalankan tugas dan fungsi BKT Tahun Anggaran 2022/Litbang adalah sebesar 97,8 Miliar (56%) dari total Dipa.

### **Bapak Pimpinan,**

Adapun realisasi penyerapan anggaran BKT posisi 31 Mei 2022 adalah sebesar 19,06%, sepertinya rendah. Jika dihitung berdasarkan total Pagu Tahun Anggaran 2022, karena secara akuntansi tetap seperti itu. Namun jika

dilihat secara lebih objektif maka progres penyerapan Tahun Anggaran 2022, anggaran yang riil terhadap anggaran yang tidak diblokir sebesar 33,93%. Blokir ini berdampak secara signifikan kepada 4 Satker Puslitbang Transportasi di mana seluruh program teknis tidak dapat dilaksanakan karena masih dalam posisi blokir.

Beberapa dampak yang ditimbulkan akibat posisi blokir Badan Litbang Perhubungan saat ini di antaranya terbatasnya penyelesaian agenda perumusan kebijakan transportasi, tidak terlaksananya program prioritas nasional yang menjadi tugas Badan Litbang Perhubungan, ada program-program prioritas nasional yang sudah direncanakan. Ketiga, pembatalan MoU dan kerjasama penelitian dengan sejumlah lembaga dan perguruan tinggi terkait dengan analisis kebijakan sektor transportasi, tidak riset lagi. Empat, tidak tercapainya target kinerja Badan Litbang Perhubungan Tahun Anggaran 2022 dan rendahnya kinerja penerapan anggaran.

Namun, kami tetap optimis dengan koordinasi antar Kementerian terkait serta dukungan Bapak-Ibu Pimpinan Komisi V DPR RI, maka prognosa di atas 95% *insyAllah* dapat tercapai.

### **Bapak Pimpinan dan Bapak-Ibu Anggota Komisi V yang saya hormati,**

Selanjutnya perkenalkan kami menyampaikan sekilas saja bahwa sebagaimana Perpres 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan telah dijabarkan tugas dan peran strategis Badan Kebijakan Transportasi. Yaitu menyelenggarakan fungsi analisa dan pemberian rekomendasi kebijakan dengan dua *output* utama yaitu rekomendasi kebijakan berupa saran, masukan, perubahan kelembagaan, SDM, dan SOP serta tidak mustahil perubahan regulasi yang ada baik tingkat undang-undang, tingkat Perpres, tingkat PP itu salah satu *output* dan *outcome* yang dilakukan oleh BKT.

Dan, rekomendasi membuat norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang transportasi yang lebih konkrit antara lain beberapa keluhan yang kami dengar dengan sungguh-sungguh dari masukan dari Anggota Dewan yang terhormat, pelayanan pada bandar udara, pelayanan pada terminal, ini hal-hal yang konkrit yang akan direkomendasikan oleh Badan Kebijakan Transportasi.

Berdasarkan penjabaran tugas dan fungsi tersebut tentunya sudah tidak ada lagi fungsi penelitian dan pengembangan yang dulu ada di Badan Litbang Perhubungan. Dan, secara otomatis perubahan tugas dan fungsi ini akan merubah struktur organisasi. Kami gambarkan bayangan organisasi tentu yang menentukan kantor Menpan, Pak, kami diajak diskusi dan arahnya sangat berbeda dengan yang ada di Badan Litbang sekarang. Kalau Badan Litbang masih pendekatan *by moda*, pusat jasa, pusat penelitian kereta api, jalan sekarang tidak. Dia berdasarkan hal-hal yang diharapkan bisa mewarnai kebijakan-kebijakan di Kementerian Perhubungan termasuk Direktorat Jenderal, yaitu pendekatannya adalah faktor-faktor yang merumuskan di bidang prasarana, bagaimana prasarana laut, darat, udara, dan kereta api yang baik. Bagaimana sarana yang tepat dan bagaimana fungsi keselamatan transportasi yang mungkin tercermin juga dalam berdampak terhadap

organisasi. Itulah sekedar gambaran organisasi yang akan datang Bapak Pimpinan dan Bapak Anggota Dewan yang terhormat.

Terakhir berangkat dari rancangan agenda strategi tersebut pada Tahun 2023 sebagaimana yang telah kami sampaikan sebelumnya, maka perkenankan kami menyampaikan usulan Pagu Indikatif Tahun 2023 sebesar 160,8 Miliar yang terdiri atas program infrastruktur konektivitas sebesar 83,5 Miliar (52%) dan program dukungan manajemen sebesar 77,2 Miliar, alokasi ini turun 64% jika dibandingkan usul Pagu Kebutuhan. Tapi kami sadar betul dengan kebijakan fiskal yang terbatas, tentu kita menyesuaikan.

Yang kami rencanakan untuk Tahun 2023, adalah:

1. Formulasi 36 kebijakan terkait sarana, prasarana, keselamatan lalu lintas angkutan sektor transportasi.
2. Dukungan 20 Direktif Menteri Perhubungan terkait isu aktual di tahun anggaran berjalan.
3. Pelaksanaan harmonisasi, uji publik, *public hearing*, rancangan terhadap kebijakan regulasi.
4. Penyusunan indikator makro pertumbuhan sektor transportasi.
5. Pelaksanaan agenda *mapping* dan identifikasi isu aktual
6. *Monitoring* dan evaluasi rencana pengembangan terhadap pelaksanaan kebijakan regulasi di sektor transportasi di lapangan.

Demikianlah, pemaparan kami dari Badan Kebijakan Transportasi, mohon dukungan Bapak Pimpinan, Anggota Komisi V DPR RI khususnya terkait penganggaran Tahun 2023 yang merupakan tahun krusial bagi lembaga baru ini. Dan, Badan Kebijakan Transportasi akan berkomitmen untuk dapat merumuskan rekomendasi kebijakan sektor transportasi yang tepat sasaran dan implementatif serta mengedepankan kolaborasi seluruh *stakeholder*.

Dan, terakhir kami sadar betul mencoba untuk merekomendasikan ke Pimpinan, bahwa dengan keterbatasan anggaran kemudian hal-hal yang kita tonjokkan adalah bagaimana *creative financing* selaku usulan Ketua yang selalu arahkan setiap dalam pertemuan. Jadi tidak dengan cara-cara menggerus lagi APBN, tetapi ada hal-hal yang dibenarkan oleh Peraturan Undang-Undang dengan *creative financing*.

Yang kedua bagaimana kita juga menggali hal-hal PNBPN, Pak Ketua sangat, bukan hanya sekedar kualitas, tetapi kuantitas, bukan hanya sekedar kuantitas, tetapi kualitas mungkin banyak yang lebih dioptimalkan. Yang terakhir tentu akan kami rekomendasikan regulasi maupun SDM yang tepat untuk melaksanakan transportasi.

Demikian Bapak Pimpinan, mohon maaf,

*Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh.*

**F- P. GOLKAR (Ir. RIDWAN BAE) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:**

*Walaikumsalam*, terima kasih Pak.

**KEPALA BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI (DR. UMAR ARIS, S.H., M.M., M.H.):**

Om santi santi om.

**F- P. GOLKAR (Ir. RIDWAN BAE) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:**

Berikutnya Pak Dirjen silakan Pak Dirjen

**Plt. DIRJEN PERHUBUNGAN UDARA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI (Ir. NUR ISNIN ISTIARTONO, M.Si.):**

*Bismillahirrahmanirrahim*,

**Yang sangat kami hormati Bapak Ketua, Wakil Ketua, dan Para Anggota Komisi V DPR RI,**

***Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh,***  
**Selamat siang,**  
**Salam sejahtera,**  
**Om swastiastu,**  
**Shalom,**  
**Salam kebajikan,**

Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena atas taufik dan hidayah-Nya kita masih diberi kesehatan dan kekuatan sehingga dapat menghadiri pada acara yang mulia yaitu rapat dengar pendapat bersama Komisi V DPR RI.

Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan guna menyampaikan laporan hasil evaluasi pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2022 serta Rencana Alokasi Anggaran Tahun 2023 Dirjen Perhubungan Udara.

**Kami sampaikan Bapak Ketua, Para Wakil Ketua, dan Para Anggota Komisi V DPR RI yang saya hormati,**

Hadir pada saat ini juga Para Direktur di sini, di Dirjen Udara, kemudian di virtual, Para KPBU, kelas I, kelas khusus dan otorita bandar udara. Pokok-pokok materi yang akan kami sampaikan pada kesempatan ini adalah sebagai berikut:

1. Evaluasi pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2022 sampai dengan Mei dan sampai dengan saat ini.
2. Rencana alokasi anggaran menurut fungsi dan program unit Eselon I dalam RAPBN Tahun Anggaran 2023.



**Bapak Ketua, Para Wakil Ketua, dan Para Anggota Komisi V DPR RI yang sangat kami hormati,**

Berikut kami sampaikan evaluasi pelaksanaan APBN Tahun 2022 sampai dengan bulan Mei berdasarkan kronologis anggaran Dirjen Perhubungan Udara Tahun 2022. Pagu Indikatif, awalnya 7,03 Triliun di mana dalam perjalanannya alokasi anggaran Dirjen Perhubungan Udara mengalami penambahan dan penurunan yang antara lain diakibatkan oleh adanya kegiatan revitalisasi bandara Halim Perdana Kusuma serta adanya proses *automatic adjustment* tahap 1 dan tahap 2. Sehingga Pagu alokasi pada Dirjen Perhubungan Udara sebesar 7,62 Triliun.

Selanjutnya adalah dari hasil evaluasi pelaksanaan APBN Dirjen Perhubungan Udara dapat disampaikan bahwa Pagu akhir sebesar 7,62 Triliun pada posisi tanggal 31 Mei telah terealisasi 2,09 Triliun (26,76%) dan pada tanggal 24 Juni sudah naik menjadi 2,58 Triliun (33,89) Triliun. Jika dilihat dari grafik kurva S, prosentasi penyerapan tentunya masih perlu ditingkatkan namun lebih tinggi daripada periode Tahun 2021. Dan, selanjutnya seyogyanya kami akan mengejar supaya dapat mencapai prognosa yang telah dijanjikan. Namun demikian kami juga menyadari bahwa dengan belum sepenuhnya pulihnya pandemi, penerbangan maka kemungkinan dari PNBPN dan BLU akan mengalami kendala dalam penyerapannya karena pendapatannya berkurang.

**Bapak Ketua, Para Wakil Ketua, dan Para Anggota Komisi V DPR RI yang sangat kami hormati,**

Dalam proses pelaksanaan anggaran di Tahun 2022 di mana dilakukan penerapan *automatic adjustment* pada beberapa K/L. Alokasi Dirjen Perhubungan Udara mengalami pula pemberlakuan *automatic adjustment* sebanyak dua kali. Yang dengan nilai total adalah 357 Miliar, di mana yang tahap 1 adalah 200 Miliar dan pada tahap 2 adalah 157 Miliar. Adapun penambahan *automatic adjustment* ini diberlakukan berdasarkan kriteria sebagai berikut.

Sumber dana adalah rupiah murni di luar belanja pegawai dan belanja barang operasional, di luar belanja anggaran pendidikan, di luar belanja bansos dan sebagainya. Dapat mencakup belanja barang non-operasional yang belum dilakukan kontrak per tanggal 25 Mei dan dapat mencakup belanja modal yang belum dilakukan penandatanganan kontrak per tanggal 22 Mei.

**Bapak Ketua, Para Wakil Ketua, dan Para Anggota Komisi V DPR RI yang kami hormati,**

Dalam upaya mendukung pelaksanaan program padat karya, Dirjen Perhubungan telah dan akan mengimplementasikan kegiatan padat karya di 140 Desa/Kabupaten, di 29 Provinsi. Berdasarkan data realisasi per tanggal 24 Juni dapat kami sampaikan bahwa telah terealisasi biaya upah sebesar 4,89 Miliar dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 2.533 orang atau sekitar 39,03% dari target total yang ditetapkan.

Kegiatan padat karya ini diimplementasikan dengan memanfaatkan dana pemeliharaan bandar udara melalui kegiatan sederhana serta tidak memerlukan keterampilan khusus seperti misalnya pemotongan rumput, pembersihan saluran, pagar, pengecatan *runway*, dan pembersihan, pengecatan gedung kantor dan sebagainya.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak-Ibu Anggota Komisi V, yang terhormat yang selama ini telah ikut berpartisipasi *men-support* dan langsung terjun ke lapangan bersama kami guna mendukung pelaksanaan program padat karya di lokasi yang direncanakan. Ke depan kami juga akan meminta Para KPA, PPK untuk ikut aktif berkomunikasi serta mengundang Bapak-Ibu dalam kegiatan padat karya di lingkungan bandar udara.

**Bapak Ketua, Para Wakil Ketua, dan Para Anggota Komisi V DPR RI yang kami hormati,**

Selanjutnya, izinkanlah kami menyampaikan poin bahasan terkait dengan alokasi anggaran menurut fungsi, program, dan prioritas anggaran Dirjen Perhubungan Udara pada Tahun 2023. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa rencana kerja Pemerintah Tahun 2023 mengusung tema peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dan, Kementerian Perhubungan khususnya Dirjen Perhubungan Udara berfokus pada prioritas nasional ke-5 yaitu memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.

Guna mencapai prioritas nasional, RPJPM, RPJMN 2020-2024 dalam kaitannya dengan konektivitas udara, khususnya perkuatan infrastruktur untuk mendukung aktivitas ekonomi serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Dirjen Perhubungan Udara berupaya dengan memberikan penekanan terhadap agenda pembangunan tertentu yang relevan terhadap situasi yang dihadapi dan intervensi yang dilakukan pada Tahun 2022 yaitu antara lain:

- Pemenuhan cakupan layanan udara perintis penumpang dan cargo, pengadaan pesawat udara perintis yang diusulkan melalui Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN).
- Program jembatan udara yang terintegrasi dengan tol laut.

Dapat kami sampaikan bahwa untuk sasaran pembangunan sektor transportasi udara Tahun 2023 adalah juga mencapai prosentase *on time performance* sebesar 89% dengan jumlah bandara baru yang terbangun sebanyak 13 lokasi serta terselenggaranya 43 rute jembatan udara.

**Bapak Ketua, Para Wakil Ketua, dan para Anggota Komisi V DPR RI yang kami hormati,**

Dalam rangka mendukung program Pemerintah serta untuk meningkatkan aspek keselamatan dan keamanan penerbangan, Ditjen Perhubungan Udara telah menyusun program-program sebagaimana yang tercantum dan ditetapkan di dalam rencana pembangunan jangka menengah

nasional dan *outlook* rencana strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tahun 2020-2024. Terdapat lima proyek prioritas usulan Dirjen Perhubungan Udara yang termasuk ke dalam empat prioritas nasional RPJMN yaitu:

- Jembatan udara dengan *major project* jembatan udara target 43 rute di Papua.
- Pembangunan bandar udara yang baru dengan target di Tahun 2023 sebanyak 16 bandara, ini merujuk kepada pendanaan dan draf renstra DJU.
- Pengembangan bandara di daerah terisolir, perbatasan, dan rawan bencana di 28 bandar udara.
- Peningkatan kapasitas bandar udara, atau bandar udara yang direhabilitasi dan dikembangkan di 156 bandara di luar bandara baru, bandara perbatasan dan rawan bencana terisolir, serta
- Pembangunan bandara perairan atau *waterbase* untuk mendukung destinasi wisata perairan dengan target dua bandara.

**Bapak Ketua, Para Wakil Ketua, dan Para Anggota Komisi V DPR RI yang sangat kami hormati,**

Selanjutnya, perkenankan kami menyampaikan kronologis anggaran Ditjen Perhubungan Udara Tahun 2023. Memperhatikan perbandingan Pagu Indikatif Tahun 2023 dengan alokasi prioritas kegiatan Pagu Renstra Tahun 2024 untuk Tahun 2023 terdapat deviasi kurang lebih sebesar 11 Triliun. Dan, dari rentang waktu 2020 sampai dengan 2023 terdapat selisih Pagu yang cukup signifikan yaitu sebesar 36,2 Triliun, lanjut.

Merujuk kepada hasil pembangunan bersama Satker, merujuk kepada hasil pembahasan bersama Satker, Pemda dan diverifikasi oleh Biro Perencanaan Kementerian Perhubungan. Pagu kebutuhan Dirjen Perhubungan Udara Tahun 2020 sebesar 19,92 Triliun. Pada tanggal 18 April 2020, Menteri Keuangan dan Bappenas mengeluarkan surat bersama perihal Pagu Indikatif belanja K/L Tahun 2023 di mana komposisi Pagu Anggaran Ditjen Perhubungan Udara adalah sebesar 7,001 Triliun dengan rincian:

- Belanja pegawai sebesar 812 Miliar
- Belanja barang operasional sebesar 863 Miliar
- PNBPN sebesar 624 Miliar
- BLU sebesar 293 Miliar
- SBSN sebesar 2,3 Triliun
- PHLN sebesar 85 Miliar dan
- Belanja barang non-operasional dan belanja modal sebesar 1,97 Triliun.

Pada kesempatan ini, izinkanlah kami menyampaikan pula catatan khusus pada usulan Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2023 untuk menjadi bahan pertimbangan. Merujuk kepada perbandingan realisasi Tahun Anggaran 2021 dan Pagu Kebutuhan Tahun Anggaran 2023, untuk realisasi belanja pegawai Tahun 2021 belum termasuk Tukin 13 dan 14 sebesar 74 Miliar yang tidak dibayarkan karena mengalami penghematan akibat pandemi.

Perlu menjadi perhatian mengingat jumlah ASN di DJU saat ini lebih dari 6.000 orang dan telah menerima pegawai CPNS sebanyak kurang lebih 2.253 orang di Tahun 2021 dan 2022 yang terdiri atas Polbit 1.159, dari STAN ada 6 orang dan CPNS umum sebanyak 1.088 orang.

Kemudian, untuk realisasi belanja operasional Tahun 2021 sudah termasuk belanja non-operasional yang bersifat operasional, perlu menjadi perhatian mengingat banyak infrastruktur yang dibangun berupa bandara baru dan fasilitas terminal baru di periode 2020-2022 baik terkait dengan pemeliharaan fasilitas, operasional bandar udara seperti tagihan listrik dan langganan jasa yang lain.

Selanjutnya, adapun penyantunan alokasi PHLN berdasarkan trilateral *meeting* antara Kemenhub, Kemenkeu, dan Bappenas untuk realisasi secara keseluruhan akan menggunakan mekanisme percepatan penarikan di tahun berjalan.

**Bapak Ketua, Para Wakil Ketua, dan Para Anggota Komisi V DPR RI yang kami hormati,**

Sekilas izinkan kami menyampaikan *outlook* Pagu Indikatif Ditjen Perhubungan Udara Tahun 2023. Fokus dan sasaran program Ditjen Perhubungan Udara Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Penyelesaian kontrak tahun jamak dan tunggakan pekerjaan.
2. Pelayanan masyarakat dalam program jembatan udara atau keperintisan.
3. Program keselamatan dan keamanan penerbangan.
4. Padat karya
5. Dukungan konektivitas dalam rangka pemulihan ekonomi nasional dan program nasional

Secara detail *outlook* dapat dilihat pada *slide* ke-14.

**Bapak Ketua, Para Wakil Ketua, dan Para Anggota Komisi V DPR RI yang sangat kami hormati,**

Berikut kami sampaikan rencana kegiatan prioritas Tahun 2023 di Dirjen Perhubungan Udara.

- Untuk subsidi angkutan perintis dialokasikan untuk 21 Korwil dengan 228 rute perintis penumpang, 41 rute kargo, dan 1 rute angkutan kargo atau jembatan udara, lanjut.

Berikut sebaran kegiatan prioritas tahun anggaran 2023 lainnya dalam rangka menunjang program Pemerintah antara lain: program pembangunan bandara baru dan pengembangan bandar udara penunjang KSPN, KEK dan kawasan Industri (KI), lanjut.

Selanjutnya, daftar kegiatan prioritas yang dilaksanakan pada beberapa bandara perbatasan, terisolir dan rawan bencana sebagaimana yang tertuang dalam tampilan layar.

- Berdasarkan data RPJMN dan Renstra Tahun 2020-2024 serta data proyek strategis nasional pada Dirjen Perhubungan Udara direncanakan terdapat 17 lokasi yang akan menjadi prioritas untuk diresmikan oleh Bapak Presiden RI sebelum Tahun 2024 yaitu; 8 bandara baru yang di antaranya adalah Nabire, Siboru, Mentawai, Singkawang, Bolaang Mongondow, Bangi Laut.
- Dan, 9 bandara yang telah ada yang dikembangkan dan dibangun fasilitas yang baru seperti terminal dan sebagainya yang ada di Ende, di Ewer, Tampa Padang, Toli-Toli, Ulya dan sebagainya.

Untuk rencana kegiatan padat karya di Tahun 2023, Ditjen Perhubungan Udara menargetkan penyerapan sebanyak 6.195 tenaga kerja dan upah sebesar 15,18 Miliar.

**Bapak Ketua, Para Wakil Ketua, dan Para Anggota Komisi V DPR RI yang kami hormati,**

Pada kesempatan ini perkenankan pula kami menyampaikan pula tantangan dan peluang yang dalam proses penyusunan Program Kerja dan Anggaran Tahun 2023 serta masukan tindak lanjut untuk dapat dipertimbangkan. Dampak dari *refocusing* Tahun 2021 dan 2022 akan berpengaruh terhadap komposisi anggaran di Tahun 2023. Serta pemenuhan kegiatan yang merupakan kontrak tahun jamak, dalam hal ini sebagai tindak lanjut perlu tambahan alokasi anggaran untuk memenuhi kebutuhan tersebut dalam menyelesaikan target-target pembangunan. Ruang fiskal Pagu anggaran, Pagu Indikatif Tahun 2023 turun. Terjadi *gap* sangat besar dengan Pagu kebutuhan sebesar 36 Triliun.

Sehingga sebagai tindak lanjutnya perlu tambahan alokasi untuk memenuhi kebutuhan sebagai dampak kegiatan *refocusing*. Perlu kami lakukan efisiensi belanja barang yang bersifat operasional yang akan berdampak pada kebutuhan operasional dan pelayanan bandara, penganggaran berbasis kinerja dengan meningkatkan efisiensi belanja di Satker Dirjen Udara dengan memanfaatkan informasi teknologi.

Selanjutnya, penugasan pada pelaksanaan prioritas nasional yang cukup besar sesuai dengan daftar pada SPBI Tahun 2023. Sehingga kemungkinan tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya karena terbatasnya ruang fiskal yang tersedia. Sebagai tindak lanjutnya perlu melakukan evaluasi terhadap prioritas nasional sesuai dengan SBPI namun tetap mengutamakan target di dalam Perpres 18 Tahun 2020 terkait RPJMN Tahun 2020-2024. Serta program yang bersifat kerakyatan yang menyentuh masyarakat langsung dengan program perintis, jembatan udara, dan kegiatan padat karya. Selanjutnya kami juga melakukan *review* target RPJMN serta Renstra Tahun 2024.

Tidak dapat melakukan pemanfaatan alokasi dana PNBPN maupun BLU secara maksimal karena kondisi penerbangan yang terdampak terhadap pandemi di mana saat ini proses pemulihan penerbangan nasional sedang dalam masa pemulihan sehingga masukan tindak lanjut perlu dilakukan skala prioritas dan program yang bersumber dari dana PNBPN di Tahun 2023.

**Bapak Ketua, Para Wakil Ketua, dan Para Anggota Komisi V DPR RI yang kami hormati,**

Selanjutnya dalam *slide* berikut, lanjut, kami sampaikan kegiatan prioritas yang merupakan usulan Direktif Presiden, Rapat Kerja, RDP serta hasil kunjungan kerja yang tetap menggunakan alokasi anggaran Pagu Indikatif Dirjen Perhubungan Udara Tahun 2023. Dari beberapa usulan di dalam Raker, RDP kami identifikasikan terdapat usulan yang telah kami evaluasi namun masih memerlukan kajian serta persiapan pemenuhan *readiness*, kriteria serta masih memerlukan proses koordinasi dengan Pemerintah Daerah. Misalnya dalam persiapan permasalahan lahan, *study*, penyusunan dokumen perencanaan, Amdal, dan lain-lain. Dalam hal ini Dirjen Perhubungan Udara akan berupaya keras untuk segera menindaklanjuti proses persiapan tersebut agar masyarakat dapat segera terpenuhi sehingga dalam kurun waktu yang dekat ke depan sudah dapat dicapai pelaksanaannya.

**Bapak Ketua, Para Wakil Ketua, dan Para Anggota Komisi V DPR RI yang sangat kami hormati,**

Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan hari ini. Besar harapan kami masukan serta dukungan Bapak Ketua, Wakil Ketua, Para seluruh Anggota Komisi V DPR RI yang terhormat. Untuk tercapainya pelayanan jasa transportasi udara yang aman, selamat dan nyaman kepada seluruh masyarakat pengguna jasa transportasi di Indonesia. Demikian, terima kasih.

*Wabillahitaufik walhidayah.*

*WAssalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh.*

Shalom,

Om santi santi om,

Namo Buddhaya,

Salam kebajikan.

**KETUA RAPAT:**

Makasih Pak Dirjen. Demikianlah penjelasan para pejabat Eselon I Kementerian Perhubungan. Sekarang sampailah pada acara saran dan pendapat Pimpinan dan Anggota Komisi V, kita mulai dari Anggota. Sebagaimana yang ada di meja sini sebagai urutan yang ada kami persilakan Pak Sudewo yang pertama.

**F – P. GERINDRA (SUDEWO, S.T., M.T.):**

Terima kasih Pimpinan.

**Pak Sekjen, Kepala BPSDM, Irjen, Kepala Litbang dan Plt. Dirjen Udara,**

Definitifnya apa, Pak? Bapak definitifnya apa?

**Plt. DIRJEN PERHUBUNGAN UDARA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI  
(Ir. NUR ISNIN ISTIARTONO, M.Si):**

Set. Dirjen Udara, Pak

**F – P. GERINDRA (SUDEWO, S.T., M.T.):**

Oh iya, *bolone dewe tonggone dewe ngloram* ini.

**Dengan seluruh jajaran yang saya hormati,**

Pertama, saya ingin mengucapkan selamat Kepada Pak Novie sebagai Sekjen Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan. Saya dilirik Pak Lasarus, itu pasti pikirnya adalah PUPR gitu ya.

Pak Sekjen, saya kira sudah sangat pahami, sebagai Sekjen apa tupoksinya *gitu* ya, dan saya yakin juga tau apa perannya, tidak hanya tugas pokok dan fungsi tetapi juga perannya. Sepanjang peran dalam bentuk kreativitas itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Saya harapkan Sekjen itu betul-betul sebagai koordinator ya, dari direktorat-direktorat. Tidak sebagai stempel ya, tidak sebagai stempel. Hanya mengamini, hanya merestui, mengiyakan dari segala yang diprogramkan dalam bentuk kebijakan maupun program ya, kegiatan di masing-masing Direktorat. Betul-betul bisa lebih detail paham apa maksud dan tujuan arah kebijakan dan juga bagaimana implementasi serta bagaimana *monitoring* dan evaluasinya di masing-masing Direktorat. Jangan sampai hanya stempel, kenapa? Di Sekretariat Jenderal itu terdiri dari beberapa Biro. Ada Biro Umum, ada Biro Hukum, ada Biro Perencanaan, dan lain-lain. Dan, Biro-Biro itu merupakan representatif atau wadah dari segala dinamika yang ada di Direktorat-Direktorat.

Meskipun saya melihatnya masih belum lengkap Biro-Biro di Sekretariat Jenderal. Mengapa di Sekretariat Jenderal nggak ada Biro Hubungan Luar Negeri? Ya, mengapa itu, padahal banyak sekali sarana prasarana yang ada di Kementerian Perhubungan itu bisa dikerjasamakan dalam bentuk KPBU atau dalam bentuk *loan* pinjaman luar negeri, *gitu*. Tapi mengapa ini tidak ada, apakah hal yang demikian itu akhirnya membuat kinerja Kementerian Perhubungan lambat dalam hal KPBU maupun hubungan atau dalam bentuk *loan*, pinjaman luar negeri. Jadi saya harap Sekjen itu betul-betul bisa memahami tupoksinya dan perannya.

Termasuk segala dinamika yang terjadi di Kementerian Perhubungan, yaitu masalah keselamatan berlalulintas, apakah berlalulintas udara, laut, kereta api, maupun darat. Akhir-akhir ini dalam Tahun 2022 sering kali terjadi

kecelakaan lalu lintas. Baik lalu lintas angkutan barang, truk, maupun lalu lintas penumpang, wisata. *Euforia* dari terjadinya pekekanan dua tahun terakhir akibat pandemic covid-19, itu mobilitas masyarakat untuk menikmati wisata sangat luar biasa. Tetapi tampaknya hal demikian tidak terpikirkan oleh Kementerian Perhubungan.

Kelihatan sekali bahwa bis pariwisata itu terjadi satu kecelakaan, tadi oleh Sekretariat Jenderal maupun oleh Litbang itu juga penekanannya adalah keselamatan berlalu-lintas. Jadi memang betul penekanannya adalah keselamatan lalu lintas, karena *outcome* dari pada semua yang diikhtiarkan oleh Kementerian Perhubungan, semua yang diikhtiarkan. Baik strategi kebijakan dalam bentuk program maupun dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang lain. Itu tujuan utamanya adalah menciptakan keselamatan berlalu lintas.

Kalau keselamatan berlalu lintas itu masih dipertanyakan realisasinya, terjadi kecelakaan lalu lintas di mana-mana, ya saya bisa katakan bahwa kinerja Kementerian Perhubungan ini adalah gagal. Karena ukuran utama, ukuran utama dalam transportasi itu adalah keselamatan, ukuran pertama. Parameter yang lain itu misalnya terjadi kenyamanan berlalu-lintas karena adanya kelancaran berlalu lintas. Tarif, bagaimana supaya tidak naik, supaya *cost* logistik itu bisa turun, itu juga merupakan parameter. Tetapi dari sekian banyak parameter yang paling utama itu adalah keselamatan.

Satu nyawa sangat berharga dan ini tidak hanya satu nyawa, 10, 20 bahkan ratusan nyawa kalau dihitung dari sejak Januari 2022. Coba dilihat data angka kecelakaan di Tahun 2021 dalam 12 bulan, itu lebih rendah daripada 6 bulan terakhir ini di Tahun 2022, mengerikan tidak? Kecelakaan lalu lintas yang terjadi berulang kali ini perlu dipertanyakan. Apa sebabnya dan mengapa ini terjadi berulang kali, mengapa tidak ada satu upaya dari Kementerian Perhubungan yang betul-betul dirasakan sehingga kecelakaan lalu lintas itu menurun. Memang tidak bisa dihilangkan, tapi menurun, tapi ini justru meningkat.

Ya meskipun Kementerian Perhubungan baik di Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Litbang, Sekjen melakukan segala sesuatu tapi belum begitu dirasakan. Parameternya sederhana ternyata naik, intensitas kecelakaan lalu lintas, bisa dibilang ini terjadi beberapa kali itu dalam pagi ini tadi di NTT, di Sumbawa atau mana, di Cipularang dan di beberapa titik untuk hari ini berapa orang yang meninggal? Iya kan.

Identifikasi terhadap faktor penyebab kecelakaan lalu lintas sebenarnya sudah dilakukan oleh berbagai lembaga. Faktor utamanya adalah kelelahan.

**F- P. GOLKAR (Ir. RIDWAN BAE) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:**

Udara ini Pak udara udara ini Pak, ya.

**F – P. GERINDRA (SUDEWO, S.T., M.T.):**

Nggak ini, Sekjen, saya Sekjen sama Litbang.



**F- P. GOLKAR (Ir. RIDWAN BAE) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:**

Oh iya iya.

**F – P. GERINDRA (SUDEWO, S.T., M.T.):**

Sekjen sama Litbang.

Karena Sekjen juga menyampaikan soal keselamatan, Litbang juga perlu melakukan penelitian dan pengembangan terhadap segala faktor yang terjadi di Kementerian Perhubungan. Litbang apakah juga melakukan satu penelitian terhadap struktur organisasi di Kementerian Perhubungan. Apakah struktur organisasi ini, ya, sudah mengakomodir semua dinamika sehingga menjawab semua persoalan-persoalan yang terjadi atau tidak, perlu dilakukan revisi, dilakukan evaluasi terhadap struktur organisasi atau tidak, Litbang tampaknya tidak melakukan penelitian itu.

Karena *nggak* ada yang namanya Direktur Keselamatan Lalu Lintas, coba kalau ada Direktur Keselamatan Lalu Lintas, di bawahnya mungkin Subdit Keselamatan Darat, Subdit Keselamatan Laut dan seterusnya. Sehingga fokus terhadap hal ini saya yakin itu akan bisa diantisipasi dan ditangani secara baik, *gitu*. Saya sampai tadi saya katakan dari awal Pimpinan, bahwa Sekjen itu jangan hanya sebagai stempel, jangan hanya mengamini tetapi lebih detail begitu. Jadi saya berharap dengan Pak Novie, Sekjen yang baru ini ya lebih berkreativitas. Ini tidak dalam kerangka menyalahkan Pak, saya berbicara karena data, saya berbicara karena fakta ya, fakta bahwa terjadi kecelakaan setiap harinya, *gitu*.

Saya ingin bertanya kepada Dirjen Perhubungan Udara, akhir-akhir ini Pak tiket pesawat sangat luar biasa tingginya. Tidak hanya di dalam negeri saja tapi juga keluar negeri, mau ke Eropa mau ke mana saja dua kali lipat. Ke Bali ke Solo, ke Surabaya, ke Labuan Bajo, ke mana saja itu hampir dua kali lipat. Ini korelasinya Litbang dengan Dirjen Perhubungan Udara, Litbang dan Dirjen Udara pernah melakukan satu kolaborasi melakukan penelitian terhadap hal ini *nggak*? Jangan berkutat pada tarif bawah dan tarif atas, sepanjang itu tidak melampaui tarif atas berarti tidak melanggar peraturan perundangan.

Itu artinya berpikir hanya sepihak, berpikir hanya dari sisi Pemerintah. Tapi bagaimana masyarakat luas yang menggunakan jasa transportasi ini, *nggak* tahu tarif atas itu seperti apa, ambang batas seperti apa, dia tahunya tinggi dan itu adalah sangat memberatkan.

Saya paham ruang fiskalnya menjadi menurun karena ada *gap* 36 Triliun akibat akumulasi dari 2021, 2022 sampai 2023. Yang ingin saya tanyakan kepada Dirjen Udara, dampaknya apa kira-kira dengan *gap* semacam ini ya, jangan sampai ini berdampak terhadap penurunan perekonomian bangsa, Pak. Sesuatu yang harus ditangani di Tahun 2021, tidak bisa ditangani itu sehingga menjadi beban di Tahun 2022, menjadi beban di 2023 bahkan mungkin akan menjadi beban di Tahun 2024.

Beban tahun anggaran itu akan pasti akan berdampak, dampaknya apa terhadap pertumbuhan perekonomian. Karena efek daripada APBN ini adalah untuk penyerapan tenaga kerja, ya, untuk memberikan daya beli masyarakat. Tapi kalau ini tidak dilaksanakan kan berarti itu terjadi satu pelemahan-pelemahan. Coba Dirjen Udara jelaskan dengan *gap* 36 Triliun itu dampak yang akan terjadi terhadap masyarakat-masyarakat kita seperti apa, ya. Jadi saya minta Litbang spektrumnya diperluas, dan betul-betul apa yang dilakukan Litbang dan Sekjen itu ada korelasinya terhadap kenyataan yang terjadi di lapangan. Kalau memang tidak ada korelasinya untuk menjawab keadaan yang di lapangan ya percuma juga, tidak akan efektif.

Yang terakhir adalah BPSDM, BPSDM ini sebenarnya sangat bagus karena ini merupakan reinkarnasi dari rezim-rezim sebelumnya. Saya anggap di Kementerian Perhubungan strategi dalam rangka menciptakan sumber daya manusianya itu lebih bagus lebih unggul daripada Kementerian yang lain. Iimbang dengan Kementerian Keuangan atau bisa saya katakan Kementerian Perhubungan ini lebih tinggi daripada Kementerian Keuangan. Di setiap Direktorat, setiap bidang di Kementerian Perhubungan itu sudah diciptakan anak-anak yang akan bekerja yang akan menangani bidang-bidang itu. Melalui dari politeknik, sekolah-sekolah, pola pembibitan maupun reguler, itu sangat luar biasa Kementerian Perhubungan. Artinya *roadmap* untuk mewujudkan sumber daya manusia di Kementerian Perhubungan itu betul-betul sudah berjalan dan tinggal evaluasinya bagaimana penempatannya.

Yang perlu saya kritisi adalah, yang perlu saya kritisi. Bagaimana anak yang sudah belajar di bidang tertentu di Perkeretaapian, di navigasi udara, di navigasi laut, di darat dan segala macam itu sesuai dengan bidangnya yang ditekuni bertahun-tahun sampai dia dikatakan ahli dan bekerja bertahun-tahun sesuai bidangnya kemudian digeser, dirubah, dimutasi tidak sesuai dengan bidangnya. Ini juga akan pasti berdampak terhadap kinerja pada bidang tersebut terhadap sektor tersebut.

Mengapa, tidak hanya penguasaan ilmu untuk mewujudkan suatu kinerja. Mempelajari sebuah ilmu pada pekerjaan yang baru membutuhkan waktu, andaikata pun dia bisa menguasai ilmu tersebut juga butuh jam terbang, kepekaan, itu sensitif itu penting *gituloh*. Jadi ini perlu dievaluasi, ya ini saya ingatkan supaya ini tidak terlalu lama terjadi tidak berkepanjangan. Sesuaikan lagi dengan penyediaan atau *roadmap* penyediaan SDM di Kementerian Perhubungan dalam rangka peningkatan kinerja.

Saya kira itu Pimpinan, terima kasih.

#### **F- P. GOLKAR (Ir. RIDWAN BAE) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:**

Makasih Pak Dewo. Waktu Pak Dewo baru-baru cukup bagus 15 menit Pak kurang lebih, tapi kalau bisa yang lain lebih *di bawah* lagi waktunya. Karena kalau bisa kita bahas agenda soal anggaran Tahun 2023 ataupun pemanfaatan 2022. Berikutnya Pak Hamka, silakan Pak Hamka.

**F – P. GOLKAR (Drs. HAMKA B. KADY, MS):**

Saya sebenarnya minta terakhir tapi gak apa-apa lah, baik.

*Bismillahirrahmanirrahim,*

***Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh,***

**Pimpinan dan seluruh Anggota yang saya hormati,  
Pak Dirjen, Pak Sekjen, dan seluruh Kepala Badan yang hadir pada  
kesempatan ini serta seluruh jajarannya,**

Banyak sebenarnya yang ingin saya sampaikan tetapi saya hanya membatasi diri dulu. Pertama, setiap kita rapat di sini rutinisme kita seperti begini kira-kira Pak. Tetapi kita harus memahami *positioning* kita masing-masing. Jangan sampai ada anggapan bahwa ini formalitas rapat kita *nih*. Ada yang saya dengar juga seperti itu tapi bukan di sini. Tetapi saya ingin menggarisbawahi bahwa posisi kita pada saat ini akan menentukan langkah pembangunan Tahun 2023, harus kita pahami itu.

Anggota DPR berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 sebagai pemegang hak *budgeting*, pengawasan, dan legislasi dan itu Bapak pasti sudah paham itu. Belum lagi Undang-Undang MD3 belum lagi Undang-Undang APBN yang setiap tahun dilaksanakan. Maksud saya adalah jangan dianggap biasa-biasa saja kalau setelah bicara ini ya selesai juga. Saya tadi itu ngobrol-ngobrol sama teman-teman hampir seluruh pembicara tadi, baik Pak Sekjen sampai Pak Dirjen, semua mengharapkan arahan dari kami.

Pertanyaannya apakah arahan sebentar ini akan dilaksanakan atau tidak berdasarkan undang-undang, jangan kita rutinisme saja *gituloh*. Saya belum mau masuk sebenarnya kepada intinya, nanti saya masuk global saja supaya kita pahami Pak. Saya tidak menggurui tetapi *standing position* saya, *standing position* kami Komisi V adalah mitra kerja Bapak yang akan memutuskan anggaran yang akan menentukan arah pembangunan ke depan diterima atau tidak.

*Nah*, oleh karena itu kita tidak usah terlalu mengada-ada, yang jelas bahwa apa yang Bapak sampaikan itu akan kami cermati secermat-cermatnya nanti. *Nah*, oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, izinkan saya pertama saya ingin mau mendengarkan dulu secara global karena Pak Sekjen ada, Karoren ada, saya ingin mau mendengarkan dulu *automatic adjustment* pada Anggaran 2022 kemarin itu berapa sih? Apa 5% atau 10%?

Karena jangan sampai nanti ke depan ini kita membahas dengan anggaran yang ada dengan berkurangnya anggaran, ini orang Kementerian Keuangan pintar semua, Pak. Tahun 2023 dia tidak pakai *automatic adjustment* lagi, fleksibilitas anggaran tetapi namanya juga pemotongan, ini juga saya debat Pak dengan Menteri Keuangan. Yang selalu masalah bagi kita perencanaan kita tidak pernah tercapai gara-gara *automatic adjustment* Bapak *gituloh*.

Itu yang saya ingin tahu sehingga program-program yang kena *automatic adjustment* itu seperti apa yang disampaikan, tolong globalnya kayak seperti apa, di Kementerian misalnya di udara itu di mana, yang mana dikurangi nih, di darat yang mana dikurangi, ini barangkali berada pada kesekjenan. Karena di situ ada Biro Perencanaan dan yang mengatur anggaran secara keseluruhan.

Selanjutnya tentu kita berpikir juga bahwa yang dimaksud Kementerian Keuangan *automatic adjustment* ini adalah tentu rupiah murni. Apakah itu kejadiannya seperti itu atau termasuk apa namanya SBSN juga termasuk *automatic adjustment*, itu yang perlu saya minta penjelasan Pak.

Kenapa ini saya mintakan, karena banyak lagi *berseliwaran* jujur saya katakan bukan hanya di Kementerian Perhubungan. Ada kontrak tidak mengikat, ada tender tidak mengikat. Tetapi kalau misalnya itu memang ada nanti, itu tidak masalah. Saya masuk pada inti persoalannya *sih* sebenarnya Pak ya, nanti detailnya kita bicara, kan Bapak minta arahan. Ya makanya arahnya yang itu yang seperti yang ingin saya sampaikan.

*Nah*, oleh karena itu saya benar-benar ingin sekali karena tahun depan dengan pengurangan, tahun depan ya Tahun 2023 dengan pengurangan anggaran, Pagu Indikatif yang berkurang masih ada kalimat fleksibilitas, ini dulu 2022 *nih*. Tadi saya, Pak Sekjen mudah-mudahan bisa memberikan gambaran kepada kami secara utuh. Sehingga kita bisa membayangkan Bapak punya perencanaan itu yang mana *backlog*-nya, yang mana ininya dan seterusnya, per *item*.

Sehingga kita bisa menganalisis satu per satu rupiah murni berapa, SBSN berapa, KPBU berapa, atukah penggunaan KS apa ya, yang otomatis itu, bukan PNB, KPBU ya? Ya kan KPBU itu otomatis digunakan ya Pak ya, eh bukan *sorry*, BLU *sorry*, itu kan yang otomatis. Apakah itu semua kena *automatic adjustment*? Yang mana yang kena *nih*?

Oleh karena itu, Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati. Saya tidak banyak sebenarnya, hanya ingin saya mau mengetahui itu sehingga Bapak-Bapak nanti ke depan itu kita tahu *positioning*-nya seperti apa ya. Kita tahu sekarang ini kalau *automatic adjustment* terus-terus, besok ini mungkin bulan depan ada lagi *automatic* Pak, *nah* akhirnya kan habis juga.

Kita membahas anggaran 2023 masih tinggi ketidakpastiannya, maka dipertajam lagi namanya fleksibilitas, bayangkan kalau fleksibilitas Pak. Mungkin dari ujung ke ujung itu akan dipangkas semuanya karena kemampuan ekonomi dan keuangan kita. Makanya di sinilah strategi perencanaan yang paling perlu dipertimbangkan dengan baik apa yang harus kita lakukan.

Oleh karena itu, saya berharap jawaban ini Pak Sekjen di bawah komandonya Pak Sekjen supaya kami paham, supaya kami bisa juga bersuara, di badan anggaran kita bisa bersuara, Pak. Saya agak kecewa kalau saya tidak bersuara padahal Bapak itu yang memberikan PNB yang tinggi ketiga yang

tertinggi *loh*, jangan main-main Pak. Janjinya Pak Menteri itu 8 Triliun loh Bapak Tahun 2023, itu tidak gampang. Nah, saya mau melihat itu Pak ya, sehingga saya ada bahan sedikit meminta Kementerian Perhubungan nanti di Kementerian Keuangan untuk tidak dilakukan *adjustment-adjustment* sembarangan *gituloh*, ini kan kita bahas anggaran nih.

Begitu pula nanti 2023 saya minta itu formatnya berdasarkan Pagu bla-bla ini Pak, *item*-nya kaya seperti apa. Sehingga kalau ada fleksibilitas nanti kita bisa tahu. Karena ada asumsi bahwa ada program yang tidak pernah kita bahas muncul misalnya.

Saya kira itu saja barangkali secara umum dulu, nanti kita bahas secara teknis mengenai 2023 dan saya kira bayangan dan gambaran Bapak sudah jelaskan kepada kami. Ya syukur *alhamdulillah* kita sepakat bahwa yang *multiyears* itu kita lanjutkan yang penting bisa selesai sampai 2024, itu sepakat, Pak. Tetapi jangan melepaskan juga hal-hal yang bisa selesai setahun dan dianggap itu adalah usulan kami dan merupakan prioritas tentu itu jadi pertimbangan utama.

Saya kira itu saja Pak Ketua sementara, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semuanya karena jujur saya mengatakan kalau di Badan Anggaran. Pak saya sedih kalau Bapak dikurangi anggarannya, di sisi lain Bapak sendiri memasukan PNBPN yang cukup tinggi.

Demikian, terima kasih,

*Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh.*

**F- P. GOLKAR (Ir. RIDWAN BAE) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:**

*Walaikumsalam*, makasih Pak Hamka. Waktunya mirip juga sama Pak Sudewo hampir sama. Berikutnya Pak Fadholi silakan Pak Fadholi.

**F – P. NASDEM (Drs. FADHOLI, M.Ikom.):**

*Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh,*

Betul, saya, terima kasih Pak Ketua yang baik hati.

**Dan Bapak-Ibu Anggota Komisi V yang saya hormati,  
Dan Pak Sekjen dan Pak Dirjen, Pak BPSDM dan Pak Inspektorat yang saya hormati.**

Yang pertama terhadap Dirjen, Plt. Dirjen ya Pak ini masih Plt. ya Pak ya? ini sederhana saja Pak pertanyaan saya kan gitu. Bagaimana cara memulihkan penerbangan itu seperti yang dulu, karena ini merupakan tonggak ekonomi. Jadi terakhir ini banyak sekali apa namanya, kegiatan-kegiatan yang memerlukan transportasi udara. Tetapi karena mahal biaya, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Dewo, sehingga ini mengganggu ekonomi.

Padahal sebagaimana kita tahu bahwa masyarakat kan tahunya infrastrukturnya cukup banyak sekarang ini di, anggarannya cukup besar. Tetapi kegiatan yang mengkaitkan dengan masalah transportasi udara ini ya terutama masih saja hal yang sangat susah *gitu*, terkait juga masalah PCR dan lain sebagainya ini juga nanti masih perlu ada kajian.

Tetapi pada intinya bagaimana agar *cost* ini menjadi murah, dengan murahnya *cost*. Kenapa Pak penerbangan itu sekarang tidak stabil, yang biasanya 2 kali menjadi 1 kali, ini alasannya apa *gitu*. *Nah*, ini saya pikir ini menjadi bagian yang sangat penting, jadi bukan pengembangan infrastruktur yang diperbanyak. Tetapi bagaimana pemulihan ekonomi dengan berkegiatan pada sisi penerbangan ini menjadi bagian yang sangat penting baik untuk masalah angkutan barang atau juga untuk wisata turis-turis dan sebagainya, ini manajemennya yang penting. *Nah*, konsep apa yang akan Bapak lakukan untuk bisa memulihkan penerbangan ini seperti sedia kala.

Kemudian yang kedua Pak, kami masih melihat bahwa ada beberapa rencana kegiatan Bapak yang saat sekarang ini masih capaian anggarannya masih belum bisa maksimal ya, masih 33% ya, Pak ya. Ini sudah bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei ya dan sekarang sudah Juni, Pak perjalanan itu. *Nah*, bagaimana rencana Bapak untuk bisa menyelesaikan bahwa anggaran ini nanti akan bisa terserap secara maksimal untuk bisa melakukan itu.

Kemudian juga ini saya membaca pada satu asumsi yang disampaikan ini bahwa ada asumsi anggaran tidak terserap Tahun 2022 sebagaimana besar merupakan anggaran yang bersumber dana PNBPN dan BLU. Dan, tidak tercapainya target pendapatan karena kemungkinan belum bolehnya sektor industri penerbangan, ini apa yang akan Bapak lakukan untuk bisa memulihkan sektor industri penerbangan itu sendiri. Kemudian tentu ini perlu di-*sounding*-kan rencana program-program itu.

Sisa anggaran yang sekarang belum tercapai ini, bisakah itu untuk bisa barangkali untuk bisa lebih memberikan skala prioritas terhadap pemulihan ekonomi di sektor penerbangan. Jangan sampai kemudian saat sekarang ini kan karena anggaran dari Dirjen ini juga besar, kemudian yang kedua juga pembangunan infrastrukturnya juga besar-besaran, bahkan ada beberapa infrastruktur yang sudah dibangun tetapi juga belum bisa berfungsi dengan baik. *Nah*, serapan anggaran ini kan akan mengganggu pada kegiatan-kegiatan yang sebetulnya sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

Berikutnya juga beberapa padat karya yang dimaksud *gitu* ya, saya juga nanti mohon untuk bisa penjelasan. Jadi padat karya yang Bapak maksudkan dan yang sudah disampaikan ini, saya perlu ada satu penajaman terhadap itu.

*Nah*, kemudian korelasinya terhadap manajemen transportasi, ini Pak jadi kebijakan transportasi ini kan ada yang di BPSDM juga ada, kemudian ada di Laut juga ada, saya mau nanya ada gak kajian secara khusus terhadap masalah transportasi udara ini Pak? *Nah*, kajian secara khususnya apa, rekomendasinya apa dan tindak lanjutnya bagaimana, ini saya pikir perlu sehingga ada satu keseimbangan di sini.

Saya yakin juga dari Dirjen apa namanya penerbangan ini Dirjen Udara ini, ada kebijakan ada kajian tapi sama nggak kajiannya dengan kebijakan transportasi ini. Karena ini memang menjadi salah satu tugas yang diberikan untuk bisa menyampaikan kajian-kajian hal tersebut.

Yang kedua kepada Pak Sekjen saya pikir Pak Sekjen tadi sudah banyak dibahas pada prinsipnya kami juga ini. Saya mau menanyakan saja apa namanya dalam menganggarkan ini, apakah masing-masing Dirjen ini menyetujui, mengajukan atau memang itu bagaimana ini Pak polanya itu kan *gitu* sehingga ini besaran anggaran dan lain sebagainya ini. Apakah itu atas kebijakan dari Kesekjenan atau mungkin ada satu rembukan.

Berikutnya, kalau Inspektorat saya tentu menyampaikan hal yang sangat bagus, ya ini saya mau tanya saja kepada Inspektorat ini. Untuk ke depan itu cukup *nggak* Pak anggarannya untuk bisa mewujudkan hal yang lebih bagus, kalau *nggak* cukup lah *wong* dekat sama Pak Sekjen kenapa ndak ngomong saja Pak, kan *gitu*. Ini kan perlu karena kita perlu mendukung untuk kegiatan ini.

Terhadap Pak Djoko yang pada BPSDM, saya memberikan apresiasi terhadap BPSDM ini dan karena ini akan mencetak dan menjadi satu hal yang memang perlu dibutuhkan sekali. Persoalan ini saya akan menanyakan Pak begitu, jadi berapa target ya berapa ribu target siswa yang nantinya akan dicetak melalui dan kemudian bagaimana komunikasinya agar semua siswa yang dicetak ini bisa terserap dan bagaimana juga ukuran kualitasnya, Saya pikir kalau programnya sudah bagus, tinggal kalau pada BPSDM ini kita perlu pengawasannya aja lah ke sana.

Nah kemudian karena berkembangnya BPSDM ini terkait dengan anggaran, saya pikir kalau anggaran BPSDM ini kan ndak mungkin nanti akan menurun, kan *ndak* mungkin BPSDM. Karena semuanya tetap, siswanya tetap, biayanya tetap, biaya rutinnya tetap, semuanya tetap. Kalau sampai itu anggarannya menurun kan berarti ada hal yang tidak bagus. *Nah*, kemudian capaian BLU-nya juga bagaimana, ini juga perlu kan.

Tapi pada prinsipnya untuk anggaran ini maka tadi sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Hamka ini perlu ada satu apa namanya, penjelasan secara spesifik terhadap rencana ke depannya. Saya pikir itu Pak Ketua, terima kasih.

*Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh.*

#### **F- P. GOLKAR (Ir. RIDWAN BAE) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:**

*Walaikumsalam.* Makasih Pak Fadholi, lagi-lagi kita bicara anggaran sekarang Pak ya, minta tolong bicara anggaran saja. Kalau menyangkut pengawasan ada besok Pak acaranya dia, ada juga beda besok waktunya. Pak Ali Mufthi silakan Pak.

**F – P. GOLKAR (DR. H. ALI MUFTHI, S.Ag., M.Si.):**

*Bismillahirrahmanirrahim,  
Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh,*

**Yang saya hormati Pimpinan beserta Anggota Komisi V,  
Pak Sekjen dan seluruh jajarannya,  
Hadirin semua yang saya hormati, terima kasih Pak Ketua atas waktunya.**

Saya menangkap begini Pak Sekjen, Pak Pimpinan. Lagi-lagi kita ini disuguhkan sesuatu yang indah, sesuatu yang baik itu kita disuruh untuk mengambil sikap terhadap sesuatu itu tapi kita nggak paham terhadap sesuatu itu. Jadi di Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan ini begitu luas spektrumnya, begitu luas cakupannya begitu tetapi yang nggak tergambar itu sebenarnya adalah dengan spektrum yang begitu luas itu Pak dengan anggaran ya walaupun dikatakan tadi ada pengurangan dan sebagainya, sebenarnya anggaran Bapak itu sudah begitu luar biasa banyaknya. Tinggal bagaimana menggunakan *resources* ini untuk melakukan tindakan-tindakan organisasi sehingga tujuan organisasi itu bisa efektif.

Saya tidak akan mempersoalkan anggaran, oke-oke saja apa yang diusulkan oleh Kementerian Perhubungan ini. Cuma yang harus dilakukan adalah kita ini butuh dijelaskan gitu ya, bahwa oh rumah ini konstruksinya seperti ini, di dalamnya itu ada kamar-kamar gitu ya, sofanya baik gitu ya. Yang menikmati orang yang akan tidur di dalam penghuni-penghuni rumah itu itu bisa tidur dengan nyaman, bisa makan dengan enak dan bisa berinteraksi secara baik di dalam rumah besar Republik Indonesia ini, itu dalam konteks di sektor perhubungan.

Bagaimana bangsa kita, rakyat Indonesia ini di dalam bertransportasi ini bisa nyaman, intinya di situ. Silakan anggaran dibuat sebaik mungkin, sebanyak mungkin kalau memang ada. Tetapi kita naik kereta api nyaman, kita naik pesawat terbang nyaman, kita bertransportasi darat, laut dan semuanya itu kita rakyat ini bisa nyaman.

*Nah*, itu semua terkait dengan anggaran yang ada di dalam Sekretariat Jenderal yang tentunya terkait dengan ada Badan Kebijakan Strategis di situ. Saya juga kepengen tahu kebijakan-kebijakan strategis apa yang itu berimplikasi secara positif terhadap rumah besar ini. Kritikkan terhadap kecelakaan, kritikan dengan harga tiket dan semuanya itu tentunya menjadi pemantik secara efektif bagi pejabat di Kementerian untuk melakukan evaluasi, gitu kan.

Kita ini punya badan strategis tapi sebenarnya itu apa strategis apa nggak, dilihat di strukturnya seperti apa, SDM nya seperti apa, *processing*-nya di dalam mengambil kebijakan seperti apa sehingga melahirkan sebuah *output* yang baik atau *outcome* yang baik.

Tiket mahal itu adalah kalau menurut saya karena Badan Kebijakan Strategis ini itu perspektif atau kacamata nya, cara melihatnya itu tidak utuh,



nah kalau sudah nggak utuh mestinya nggak strategis. Bagaimana kita akan bisa menghidupkan kembali sektor udara ini secara baik kalau atau misal tiketnya mahal, itu saja faktornya, tiketnya mahal, bandaranya kurang efektif, terus maskapainya itu, bayangkan saja Surabaya-Solo, Jakarta-Surabaya, Solo-Jakarta itu Garuda nggak ada, terbatas sekali jam terbangnya dan sebagainya dan sebagainya.

Oleh karena itu, relevansinya Pak, Pak Sekjen, Pak Pimpinan *oke* anggaran saya pikir tidak jauh beda dari tahun ke tahun. Tetapi adalah bagaimana *processing* organisasi ini bisa efektif untuk kepentingan pengguna kebijakan, apa itu publik Indonesia, *gitu*.

Yang kedua,

**Bapak-Ibu sekalian Pimpinan yang saya hormati,**

Di Inspektorat Jenderal, ini tentunya yang harus dipikir itu saya tadi melihat ada sebuah angka. Misal audit dengan tujuan tertentu ada 16 kali yang sudah dilaksanakan 15 kali atau misalnya. Ini, ni, ini baru 6. 4, 5 bulan atau misalnya. Kalau anggaran itu ditambah dari Januari maka baru 5 bulan, itu kok sudah 16 kali, 15 kali. Tentunya audit dengan tujuan khusus itu tentunya ada pejabat yang merekomendasikan sebuah peristiwa sehingga Inspektorat itu melakukan tindakan audit itu ya. Kalau misal di semester kedua nanti ada lagi terus bagaimana Pak itu anggarannya, padahal anggarannya cukup besar Pak itu. Bayangkan hanya audit 3 Miliar *gitukan*, auditnya apalagi audit dengan tujuan tertentu, itu sudah sangat besar sekali gitu ya. 3 Miliar lebih itu 15 kali 16 kali artinya sudah 15 kali kurang 1 itu, apa sudah habis apa belum, *nah*, ini perlu ada ada definisi, Pak, ada definisi, Pak.

Yang terakhir, Pak.

**Bapak-Ibu sekalian Pimpinan yang saya hormati,**

Ada sebuah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan alokasi anggaran yang sudah ada Pagu indikatifnya, sudah ada *budget*-nya gitu. Pertanyaan kita Pak sekalian, kalau anggaran kita ini nggak akan masalah selama kebijakan tentang *human resources*, ya kebijakan tentang pengembangan sumber daya manusia itu tetap harus bermuara kepada apa, kepada bagaimana kebijakan pengembangan SDM ini ada dikaitkan dengan pengguna, siapa itu pengguna? publik Indonesia.

Untuk apa SDM itu banyak, SDM itu baik, SDM itu melimpah, tetapi pengguna kebijakan itu belum bisa menikmati secara utuh maka kalau kita ngomong tesis itu maka ditolak. Ya kalau kita dulu saya sidang disertasi itu ini ditolak apa diterima, gitu ya. Kan ini harus sinkron Pak antara A, B, C ini harus sinkron ya harus sinkron. *Nah*, oleh karena itu indikator kebijakan SDM ini baik kalau *human resources* kita ini bisa dinikmati rakyat Indonesia di sektor transportasi.

Saya pikir itu Pak cara pandang saya terhadap Kementerian Perhubungan ini sehingga kita harapkan Kementerian Perhubungan ke depan ini menciptakan bangsa kita rakyat Indonesia bertransportasi secara nyaman. Ya bertransportasi secara nyaman, aman di jalan nyaman dan sebagai dan sebagainya. Ingat bahwa peradaban tertinggi orang itu ada di *morality*, di akhlak Pak, di akhlak. Transportasi hidup kita ini apakah menjadi standar kita, orang bertransportasi itu Pak kalau saling menghormati, maka adab kita, moral kita, akhlak kita itu sudah baik. *Nah*, tentunya kebijakan SDM ini harus mengarah ke sana.

Pimpinan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf.

*Wassalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh.*

**F- P. GOLKAR (Ir. RIDWAN BAE) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:**

*Waalaiikumsalam*, makasih Pak Ali Mufthi. Pak Bob Andika, silakan.

**F – PDIP (BOB ANDIKA MAMANA SITEPU, S.H.):**

Terima kasih, Pimpinan.

**Yang saya hormati Pimpinan beserta seluruh teman-teman Anggota Komisi V,**

**Yang saya hormati Pak Sekjen, Pak Kepala BPSDM, Pak Irjen, Pak Kepala Balitbang beserta Plt. Dirjen Perhubungan Udara,**

Saya singkat saja Pak, saya langsung saja kepada Pak Sekjen saya lihat salah satu tugas tupoksi Bapak adalah penataan organisasi salah satunya Pak. Saya lihat ini sekarang masih banyak Plt. nih Pak. Plt. sebentar lagi beberapa Dirjen lagi yang akan pensiun dan akan terjadi lagi Plt. Kita berharap dengan Bapak sebagai Sekjen yang baru cepat menyelesaikan permasalahan Plt. ini Pak. Supaya ke depan dalam mengambil kebijakan anggaran ini, Dirjen-Dirjen definitif ini akan lebih mempunyai tanggung jawab daripada Plt-Plt, yang sekarang Pak Sekjen, saya rasa itu.

Untuk Kepala Balitbang, ke depan Pak, atau masih ada waktu untuk menyisipkan anggaran itu bagaimana Bapak tolong membuat kajian-kajian, jangan kita ini membangun kereta api, ya rel kereta api kita peningkatan membangun yang baru. Tapi kita lupa untuk memikirkan keselamatan masyarakat yang melewati rel-rel kereta api tersebut, Pak. Ini baru-baru ini terjadi di Serdang Bedagai, Pak, kasian kita Pak bus pariwisata ditabrak kereta api karena tidak ada pintu palang kereta api. Anggaran yang kita bangun kereta api cukup luar biasa Pak, triliunan. Tapi untuk soal pintu palang kereta api aja itu pun kita nggak bisa mengadakan itu, Pak. Ini tolong Pak kajian-kajian ini kalau masih ada anggaran, Pak, tolong ini kajian-kajian ini Bapak buat.

Selanjutnya untuk Pak Irjen, Pak Irjen. Inikan kita lihat banyak ini Pak masih seperti di tempat saya di Dapil saya ini ada ini ada ini pembangunan Bandara Sibisa. Saya lihat tiap tahun ada saja yang dianggarkan Pak Tahun

2023 pun ada lagi yang dianggarkan. Saya minta Pak Irjen, khusus ini tolong nanti turunkan tim ke sana Pak, tolong dulu cek Pak, *gimana* perkembangan kegiatan tersebut. Supaya ini jadi salah satu supaya ini kita tahu Pak, saya rasa di sana masih banyak kendala-kendala ini Pak, kapan ini selesainya Pak, kalau tiap tahun kita anggarakan. Jangan nanti target kita mau kita selesaikan cepat tapi kita anggarakan terus pelaksanaannya terburu-buru dan ini *nggak* efektif Pak ke depan bandara ini.

Terus ke Pak Kepala BPSDM, Pak, kita ini lihat, Pak ini ada di tempat Bapak ini ada penerimaan ya sekolah kedinasan dan ada juga reguler nih Pak. Tapi orang semua *pingin nih* sekolah kedinasan Pak, daripada yang reguler. Karena reguler ini kan kita lihat ini kan mereka mengeluarkan uang sendiri tapi kalau yang kedinasan ini kan di subsidi Pak oleh Pemerintah, kita berharap ke depan Pak. Ya sudah sekolah ini yang reguler ditiadakan saja, Pak, lebih bagus kedinasan saja, Pak. Karena ini kita menghemat anggaran yang seperti sekarang ini kita banyak yang seperti sekarang ini kita banyak yang seperti sekarang ini dipotong terus Pak, kan kasian kita, Pak. Lebih bagus yang reguler tidak ada atau kedinasan saja, Pak. Karena kita lihat rata-rata orang semua inginnya di kedinasan, Pak yang disubsidi.

Terus ini ke Pak, Dirjen PLT Pak, saya berharap jangan lagi ada PLT Pak. Karena Bapak ini sebagai PLT pasti ragu-ragu menggunakan kebijakan anggaran ke depan Pak, karena Bapak bukan Dirjen. Saya berharap Pak, ini tadi Bapak sudah sampaikan yang usulan saya yang Binaka saya ucapkan terima kasih Pak Sekjen sudah masuk, waktu Pak Sekjen menjadi Dirjen ini usulan-usulan kita untuk Binaka sudah masuk. Karena ini ke depan kita perlu juga membangkitkan Binaka ini Pak. Kita kasihan, ini tuh salah satu daerah terluar tapi posisinya sekarang ini harus lagi transit ke Medan lagi baru bisa ke Jakarta dulu bisa langsung dari Binaka langsung ke Jakarta.

*Nah*, ini Pak Sekjen saya lihat Pak Sekjen ini Pak, ini *passion-nya ndak* cocok ini Pak Sekjen ini saya lihat, dia lebih cerah wajahnya ini di Dirjen ini saya lihat, dari tadi saya lihat payah dia senyum, nih, Pak, kalau Dirjen senyum aja dia kerjanya Pak. Mungkin ini sedikit Pimpinan, terima kasih.

**F- P. GOLKAR (Ir. RIDWAN BAE) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:**

Rupanya Bob sambil membaca juga ya, sambil membaca. Pak Muhammad Fauzi silakan, Pak.

**F – P. GOLKAR (MUHAMMAD FAUZI, S.E.):**

Makasih,

***Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh,  
Selamat sore,  
Salam sejahtera bagi kita semua,***

**Yang saya hormati Pimpinan rapat, Bapak Sekjen, Bapak Irjen, Bapak BPSDM, Kepala Badan ya, kemudian Kepala Badan Kebijakan Transportasi Perhubungan, Kemudian Dirjen Perhubungan Udara, Plt.,**

Ada beberapa hal Pak, yang ingin saya perlu minta penjelasan Pak, ya, yang pertama untuk Pak Sekjen. Tadi juga sudah disentuh oleh beberapa teman-teman mengenai bagan ke Sekretariat Jenderal, Pak. Cuma ada satu yang menurut saya mengganjal, Pak, mungkin nanti bisa dijelaskan Pak ada bagan di 11 Pak, ya yang Mahkamah Pelayaran Pak, bagi saya sih agak mengganjal saja kenapa dia masuknya ke Kesekjenan *gitu*, kenapa dia tidak masuk di kelautan. Kalau Komite Nasional Keselamatan Transportasi menurut saya wajar itu karena dia umum Pak, *gitu* saya perlu kejelasan Pak.

Kemudian yang kedua kalau *nggak* salah juga tadi sudah ada yang menyentuh ya Pak ya, realisasi anggaran Pak di 2022 masih relatif kecil Pak, 39,32%. *Nah*, dengan rentang waktu yang masih ada ini apa masih bisa terserap Pak? Kemudian strategi apa Bapak akan lakukan?

Berikutnya ini masalah PNBPN, Pak, saya lihat ini juga ada satu hal yang aneh, *gitu* Pak ya. Di Tahun 2021 PNBPN-nya malah lebih bagus Pak dibanding '22 Pak, padahal covidnya sudah melandai *gitu* Pak. *Nah*, ini saya juga ingin tahu Pak, apa penyebabnya? Seharusnya kan 2022 ini harus lebih baik karena kan alasannya pasti covid, *nah*, covid sementara sudah melandai. Kemudian juga ya saya *nggak* tahu ya, apa saya lagi *nggak* ada, seingat saya agak kurang nih Pak Ketua kita bicarakan tentang PNBPN di Komisi V ini.

Untuk yang terakhir Pak, apa, Sekjen mengenai apa ini, prioritas kegiatan di Kesekjenan untuk publikasi, Pak. Saya juga agak kurang paham Pak membedakan ini di poin ke-6, Pak ya. Kegiatan komunikasi publik melalui pemanfaatan media sosial dan jejaringan komunikasi. Apa bedanya yang tadi saya bacakan dengan yang saya akan bacakan, pelaksanaan kegiatan komunikasi dan informasi publik melalui pemberitaan. Di mana membedakannya? Menurut saya itu satu kesatuan itu, *gitu*, karena pemberitaan itu kan hasil, *gitu*. Kemudian juga jenis alat media apa yang dilakukan, apakah media cetak? Media elektronik? Atau media *online*? Itu perlu penjelasan, Pak.

Itu untuk Pak Sekjen, kemudian untuk Pak Inspektorat apa ya, Inspektorat, kira-kira Pak, apa yang Bapak lakukan dalam hal berkoordinasi ke daerah-daerah dalam rangka mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan, Pak, itu apa yang Bapak lakukan. Kemudian, berapa persen *sih* Pak yang ditindaklanjuti *gitu* ya atau menjadi pegangan bagi Pimpinan, hasil daripada Inspektorat dalam hal mutasi atau pergeseran, jadi ukuran *nggak gitu* hasil daripada hasil investigasi *gitu* ya. Misalkan ada pegawai yang bermasalah tapi tetap jabatannya dinaikan atau tidak itu saya ingin tahu persentasenya sejauh mana.

Saya pikir itu untuk Inspektorat, kemudian untuk BPSDM yang pertama. Ini juga saya ingin mengetahui juga sama dengan tadi Pak, ya hasil latihan

yang Bapak selenggarakan ini berapa persen kira-kira menurut perkiraan Pak ya, yang dipakai oleh Pimpinan dalam hal menempatkan personalia ASN, Pak. Karena kalau kita pelatihan-pelatihan terus kompetensi sudah bagus tapi juga tidak menjadi kriteria juga kan menjadi hal yang mubazir.

Yang kedua, kira-kira kendalanya apa *sih* Pak kira-kira dalam hal peningkatan sumber daya manusia yang sangat-sangat mendasar yang juga saya ingin ketahui.

Berikutnya ini juga pencapaian Pak, di tempat Bapak ini target kegiatan strategisnya sebesar 1,87 Triliun tapi penyerapannya cuma 17,15%, Pak. Ini lebih lebih dilematis lagi Pak, dengan waktu yang sangat-sangat terbatas seperti ini apakah bisa Pak, sementara teman-teman anggaran ini cukup berat memperjuangkan anggaran, setelah anggarannya ada tidak dimaksimalkan, tolonglah ini menjadi perhatian Bapak.

Berikutnya, apa mengenai padat karya Pak tadi disampaikan Pak, ya sepemahaman saya juga padat karya ini sebenarnya kalau kita koneksitas kita dengan apa, kepentingan kami di Dapil sebenarnya sangat luar biasa, Pak. Tapi sayangnya ini belum maksimal kami rasakan Pak, *nah* ke depan apalagi Tahun 2023 ini tahun yang mendekati kami harus berkompetisi kembali, saya pikir tolonglah kita bisa berbagi peran di situ Pak. Karena menurut saya di perhubungan ini sangat minim sekali ruang itu, Pak. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih ditingkatkan.

Oke berikutnya untuk apa Badan Kebijakan Transportasi Perhubungan. Yang pertama, kira-kira, kita memahami Pak ya bahwasannya badan Bapak ini masih transisi. *Nah*, kira-kira kapan Pak sampai ini bisa *established*. Karena kalau transisi terus nggak selesai-selesai program. *Nah*, ini saya minta kepastian informasi dari Bapak. Saya juga sepakat dengan Pak Dewo tadi, kira-kira harus ada juga konsep Pak mengenai bagaimana keselamatan yang ideal yang perlu kita ke depan. Di samping itu juga perlu juga konsep, saya sampai saat ini terus terang saja. Saya belum pernah mendengar konsep bagaimana kontribusi perhubungan, Kementerian Perhubungan dalam rangka mencegah kemacetan Pak, sampai saat ini saya belum ada, *nggak tahu* teman-teman yang lain ya. Saya belum pernah mendengar kira-kira konsepnya apa *sih*, apa ini bagian daripada perhubungan atau ini bagian daripada kepolisian saya juga kurang apa, kurang paham.

Berikutnya juga prasarana transportasi ini juga perlu di apa, dikedepankanlah Pak, sehingga orang ini bukan saja transportasinya baik tapi prasarananya juga ,menjadi salah satu ukur masyarakat untuk meninggalkan kendaraan pribadi Pak. Pada saat itu terpenuhi, *insyaAllah* apa orang akan meninggalkan kendaraan pribadi dan kemacetan menjadi diminimalisir.

Yang terakhir untuk perhubungan udara, saya kembali lagi Pak, ingin minta penjelasan serah terima bandara dari PT. Pale ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan *nah*, saya ingin mengetahui statusnya itu nanti seperti apa Pak, statusnya, kemudian operasionalnya siapa yang harus bertanggungjawab *gitu* Pak.

Berikutnya di Sulawesi Selatan itu Pak di bandara Pak, sekarang ini Pak, kasihan masyarakat kalau yang mereka mau menggunakan pesawat tetapi pagi hari mereka naik bis. Misalkan dari daerah-daerah dari bawah Pak, itu bis kadang-kadang nggak masuk ke dalam Pak, *nah* mungkin nggak disediakan bis, kalau ojek atau ini kalau jam 2 jam 3 mereka sampai di ujung bandara itu agak kesulitan itu, Pak, kasihan masyarakat di situ kadang-kadang sampai jalan kaki. Saya *nggak* sekali dua kali melihat masyarakat jalan kaki Pak.

Kemudian saya juga pernah apa pernah mengusulkan Pak, apa Bandara Buah, Pak ya tapi di sini belum masuk, Pak, tolonglah diperhatikan *gitu* Pak ya, Buah itu ada di Luwuk, Pak, di Luwuk.

Kemudian saya ingin mengetahui juga bandara-bandara yang tidak ada apa ya alat. Saya pernah bicara Pak ya sama teman-teman BMKG, jadi ada beberapa bandara di Sulawesi Selatan ini yang tidak mempunyai mendeteksi cuaca Pak. Seperti misalkan di Toraja itu, Pak, itu kan nggak ada Pak, termasuk jangkauannya. *Nah*, ini bagaimana tingkat keselamatan terbang, Pak, ini keselamatan terbangnya seperti apa?

Yang terakhir Pak, ya program-program yang masuk di Dapil kami, kalau bisa Pak dikoordinasikan dengan kami bahkan kalau ada yang tidak kami usulkan kalau memang masih bisa dipertimbangkan untuk diganti saya pikir ini satu hal yang baik, Pak. Karena jangan sampai juga masuk program tapi kami *nggak* tahu Pak gitu.

Oke Pimpinan makasih,

*Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh.*

**F- P. GOLKAR (Ir. RIDWAN BAE) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:**

Makasih Pak Muhammad Fauzi, dari Anggota sudah selesai. Maka unsur Pimpinan, silakan Pak Roberth.

**F – P. NASDEM (ROBERTH ROUW) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:**

Terima kasih, Ketua.

**Ketua dan seluruh Anggota Komisi V yang saya hormati,  
Yang saya hormati saudara Sekjen,  
Saudara Irjen,  
Kepala BPSDM,  
Kepala Badan Kebijakan Transportasi dan Dirjen Perhubungan Udara,**

Yang pertama, saya lebih banyak mungkin nanti ke saudara Dirjen Perhubungan Udara karena sesuai dengan Dapil saya ini sangat membutuhkan diskresi khusus dari Pak Menteri khususnya dan lebih khusus Saudara Dirjen Perhubungan karena melihat situasi kondisi kami di sana terutama di daerah pegunungan itu masih banyak daerah yang belum dapat terlayani dengan

angkutan darat, karena laut tidak mungkin juga. Jadi yang paling bisa dihubungkan itu dengan udara.

Melihat itu saya ingin menggarisbawahi beberapa diskresi khusus yang diberikan oleh Kementerian di daerah kami, agar menurut saya sesuai dengan amanat undang-undang kami punya hak untuk memberikan atau menjawab aspirasi dari daerah kami. Maka saya ingin supaya Saudara Dirjen kalau misalnya ada *slot* untuk di daerah kami khususnya di Papua. Misalnya ada beberapa pembangunan bandara baru, ya tolong kami juga diberikan hak untuk menentukan. Jadi, kalau ada 3 ya 1 diberikan ke kami, kami yang tentukan di mana, karena itu amanat undang-undang agar aspirasi yang melalui kami bisa juga tertampung terbaca di dalam RKL nanti.

Dan, yang berikut Saudara Dirjen saya kira waktu itu, Pak Sekjen ya kami makan bersama Pak Menteri waktu itu saya minta untuk preservasi lapangan terbang di Kabupaten Kepulauan Yapen di Serui. Saya lihat ini tidak ada di dalam ini, karena waktu itu Pak Menteri minta supaya ini jadi prioritas karena saya pulang pasti saya ke sana, ini nanti kita kunjungan saya mungkin balik ke sana. Itu saya merasakan sendiri bagaimana turun dengan pesawat itu betul-betul landasannya sudah tidak layak lagi.

Jadi, ini menjadi perhatian karena Pak Menteri waktu itu sudah menjanjikan. Ya, karena 2022 sudah lewat saya kira mungkin bisa tertampung di dalam 2023, tapi saya lihat di apa yang disampaikan oleh Pak Dirjen ini tidak ada di dalam itu. Jadi, mohon jadi catatan agar ini bisa tertampung nanti.

Yang berikut, saya lihat ada satu bandara di Kabupaten Yahukimo, ya ada itu, mungkin nanti karena ada beberapa hal yang kami dapatkan di daerah kami terutama tentang pembangunan dari Kementerian Perhubungan. Yaitu seperti pelabuhan, bandara, ya ini kurang ada komunikasi dengan Pemerintah Daerah *gitu*. Jadi, mungkin nanti saya minta supaya kita akan minta kepada Pemerintah Daerah, yang mana yang menjadi prioritas untuk Pemerintah Daerah itu dibuka *gitu* ya. Jadi, ini juga harus kita minta tanggapan dari mereka ya kan. Karena ada yang menjadi prioritas yang memang menurut Kepala Daerah itu yang harus dibuat tiba-tiba kita buka di tempat lain *gitu* di daerah dia. Sedangkan mereka inginkan di tempat A atau kita buka di tempat B.

*Nah*, ini yang mereka selalu tidak ada komunikasi ini, ya kan, saya di daerah saya pernah mendapatkan seperti itu. Bahwa ada dibangun pelabuhan perintis untuk feri antar Kabupaten, antara Yapen dan Biak-Waropen. *Nah*, itu saya punya datanya dan saya ada foto semuanya. Jadi mulai dibangun sampai jadi tidak bisa dipakai dan hancur sekarang, bagaimana ke depan, hancur itu, karena memang dibangun tidak layak di situ. Itu di Yapen itu di Pelabuhan Sobe Pak, namanya itu. Itu terbuang begitu saja, *gitu*, padahal harusnya ada lokasi yang baik di sebelah. *Nah*, itu yang mungkin nanti saya akan minta proposal untuk Kementerian karena sangat dibutuhkan sebenarnya, untuk feri itu antar Kabupaten. Karena bagaimana untuk bisa mobilisasi hasil-hasil masyarakat di sana untuk bisa dijual ke Biak dari Yapen begitu.

Karena ini hancur semuanya, tidak bisa dipakai dan sampai sekarang jadi bangunan tua di situ, pelabuhannya sudah tinggal rangka-rangkanya saja dari mulai dibangun sampai sekarang *nggak* pernah ada kapal feri yang masuk. Hal-hal seperti ini yang perlu saya ingin garisbawahi, ya karena tidak ada komunikasi dengan Pemerintah Daerah, *main* dibangun saja ternyata tidak bukan tempatnya yang layak itu. Jadi, itu yang mungkin perlu menjadi catatan pada Pak Menteri, nanti saya sudah saya sampaikan jadi tolong Pak Sekjen tolong dilihat lagi.

Yang berikut nanti kami akan reses, kami akan datang ke sana nanti, saya sudah minta supaya semua Kepala Bandara nanti kita ketemu di Jayapura. Itu yang pertama itu tentang bagaimana penambahan panjang landasan di Wamena. Kemarin, saya sudah ada fotonya saya bersama Pimpinan Daerah, sudah dibebaskan lahannya ya. Mungkin sekitar penambahan sekitar 200 Meter agar itu bisa lebih aman karena pesawat besar yang sudah turun kalau muatnya banyak, itu dia berhentinya itu sangat terganggu sekali apalagi kalau cuacanya agak jelek, ya.

Dan, yang berikut nanti Bandara Sentani, Bandara Sentani ini memang kemarin saya tanya kenapa penerbangan tidak bisa pakai pesawat yang lebih berbadan lebar, ternyata untuk kalau pakai pesawat yang berbadan lebar lebih besar itu dia muternya susah. Jadi, minta dilebarin saja, panjangnya sudah *oke*, panjangnya sudah *oke*, ya minta dilebarin. Ini yang nanti mungkin menjadi perhatian kami untuk ke sana karena saya juga sudah minta untuk Pemda untuk bisa kalau ini tolong lahannya dibebaskan supaya kami bisa masuk untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

Saya kira hal-hal itu yang perlu kami sampaikan Pimpinan terima kasih, saya kembalikan ke Pimpinan.

#### **KETUA RAPAT:**

Makasih Pak Roberth. Pak Bakri, virtual ada satu orang virtual. Maaf Pak Roberth, karena dia terakhir minta waktu baru-baru, harusnya dia duluan tapi karena terakhir dia minta, Pak. Pak Bakri mana silakan.

#### **F – PAN (H.A. BAKRI HM., S.E.):**

Iya iya baik baik terima kasih Pak Ketua atas penyampaiannya. Jadi saya mungkin langsung saja ini *to the point* ke Dirjen Udara, Plt. Di Jambi itu ada masuk prioritas untuk pekerjaan pembangunan bandara Depati Parbo Kerinci. *Nah*, ini tadi saya sudah bicara langsung dengan Kepala Bandaranya bahwa pembebasan lahannya *insyaallah* tahun ini selesai. Oleh sebab itu, saya minta di Tahun 2023 ini mungkin sudah bisa dikerjakan itu pertama pemagaran. Karena tanah yang sudah dibebaskan itu yang mungkin cukup lama dan banyak tantangan, supaya aman tanah yang sudah dibebaskan oleh Pemerintah Provinsi itu bisa dipagar.



Terus yang kedua yaitu pekerjaan *runway* sama *taxiway* apron-nya, ya. Itu mungkin dua pekerjaan itu yang mungkin yang bisa menjadi prioritas di Tahun 2023.

Begitu mungkin dari saya sementara itu, Pak Ketua, jadi sekali lagi bandara Depati Parbo Kerinci karena itu juga termasuk daerah wisata. Mudah-mudahan di Tahun 2024 juga bisa diselesaikan karena pekerjaannya pekerjaan berkelanjutan. Yaitu pertama pagar, kedua itu *runway*, *taxiway*-nya dan apronnya lah termasuk juga semua-semuanya. Kalau terminalnya juga kalau mungkin *alhamdulillah*, itu saja mungkin Pak Ketua, terima kasih.

*Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh.*

#### **F- P. GOLKAR (Ir. RIDWAN BAE) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:**

*Walaikumsalam*, makasih Pak Bakri, mau berangkat ini Pak Bakri? Iya sekarang saya Pak, nanti terakhir Pak Ketua.

Saya hanya mau bicara mungkin Dapil saja. Yang pertama tadi ada penjelasan Pak Dirjen Udara yang menyampaikan bahwa ada 16 bandar udara kalau tidak salah, ada 16? 17 ya 17 bandar udara baru yang akan dibangun Tahun 2023, 2022 ya 2022 kalau saya tidak salah tadi, targetnya ya targetnya *gitu* ada 16 atau 17. Cuma saya lihat Sulawesi Tenggara untuk Kolaka Utara saya lihat belum masuk Pak, di situ.

Saya mohon kalau bisa itu disisipkan satu di situ karena kasihan mereka sudah mengeluarkan uang 65 Miliar itu, Pak di situ, sudah mengeluarkan uang 65 Miliar untuk pembangunan tahap awal tentang Bandara Kolaka Utara itu, mungkin barangkali perencanaan yang belum kelar apa segala barangkali ya mungkin kalau Pemda sudah tidak sanggup lagi untuk melaksanakan perencanaan itu mungkin kita minta tolonglah dari Departemen Perhubungan langsung yang melaksanakan itu perencanaannya, jadi semua bisa berjalan secara baik, Pak.

Karena alasannya sangat kuat Pak, pertama di sana penghasil tambang yang banyak Pak di sana dan mutunya sangat bagus oleh tambang kita di sana. Kemudian yang kedua jalan kita jalan nasional kita di sana, itu ada gunung namanya gunung Tamorasi. Berat sekali dilewati di sana dan setiap tahun ada korban Pak, setiap tahun ada korban di sana. Kalau ada jalan ya Pak Sekjen Pak Dirjen barangkali bisa menjadi perhatian, tidak bukan-bukan sebuah paksaan tapi ini harapan. Karena *biar* bagaimana kasihan juga yang ada di sana dia sudah mengorbankan uang 65 Miliar, uang daerah lagi harus terhenti begitu saja kasihan. Yang kedua kalau ada jalannya perencanaan tidak ditangani sehingga 2023 dilaksanakan, karena saya yakin 2023-2024 itu selesai kalau dua tahun dikerjakan, Pak.

Itu yang pertama, yang kedua Wakatobi Bandara Matohara itu. Itu kan baru-baru Presiden tidak bisa mendaratkan pesawatnya saya lihat di situ itu Pak, barangkali bisa menjadi perhatian perpanjangan *runway* di situ. Karena biar bagaimana kan di situ adalah daerah tujuan wisata nasional kita ada 10

tujuan wisata daerah kita di situ. Maka barangkali bisa menjadi perhatian juga untuk menjadi apa namanya perpanjangan *runway* itu. Sehingga kalau ada kunjungan Presiden atau ada rombongan-rombongan besar ke sana itu bisa juga menjadi tidak kesulitan.

Yang berikutnya, tadi saya terima kasih kepada Pak Sekjen ya dengan Pak Menteri, sampaikan salam hormat saya kepada Pak Menteri. Baru-baru dari kita kunjungan spesifik hadir dari PUPR, kemudian hadir juga dari Perhubungan yang diwakili Eselon II dari Sulawesi Selatan Pak Makassar, Pak.

Dan, kami sudah menyampaikan ini tentang bandara semua di Sulawesi Tenggara termasuk Sugi Manuru, kampung kelahiran saya di sana Pak dan bandara itu memang saya masih jadi Bupati, saya yang dorong waktu itu Pak, saya dengar kabar ada juga rencana mau juga diresmikan oleh Presiden di situ. *Nah*, itu juga tolong Pak barangkali juga bisa dipercepat di situ. Termasuk kesulitan yang ada di kerusakan-kerusakan di *anu*, di, apa di apa namanya Bandara Haluoleo, itu sudah banyak rusak itu AC nya kemudian *x-ray* nya apa segala, baru-baru saya lewat sana Pak Sekjen. Itu lagi ada kerusakan Pak saya langsung foto keadaan yang ada di sana, Pak.

Barangkali itu saja hanya itu yang saya ingin sampaikan dari saya dari Sulawesi Tenggara. Saya berharap Pak Sekjen, Pak Dirjen untuk menjadi perhatian. Selanjutnya Pak Ketua silakan, Pak Ketua.

#### **KETUA RAPAT:**

Baik terima kasih.

**Pak Ridwan Pimpinan rapat, Pak Roberth, teman-teman Komisi V, Pak Sekjen beserta seluruh Eselon I dari Kementerian PUPR dan seluruh jajaran,**

Pertama, Perhubungan, nanti langsung tertulis saja jawabannya, Pak, tadi saya lihat juga kita ini kan masih kalau untuk anggaran kan masih pra ini, pra anggaran. Karena kita akan dalam lagi nanti setelah nota keuangan tanggal 16 Agustus nanti kita baru ketemu lagi. Namun demikian masukan, pendapat dan saran dari teman-teman Komisi V ini tolong diatensi, Pak. Karena ini nanti akan kita bahas kembali nanti pada pertemuan berikutnya, saya rasa itu untuk rapat hari ini dan mekanisme kita ke depan.

Kemudian saya juga ke Dapil, Pak, terima kasih Singkawang itu memang harus selesai Pak Sekjen, Pak, Plt. Dirjen Udara. Kemudian ada Bandara Rahadi Rusman Ketapang Pak, ini kan agak padat Pak tiga kali sehari KTR ya ke Ketapang ini. Karena memang ke sini kalau kita jalan darat butuh waktu kalau saya tidak salah itu 10 sampai 11 jam Pak ya. Jadi pilihan orang memang lebih efisien menggunakan pesawat.

Ini bandara Pak saya kemarin kan walaupun saya dari Kalimantan Barat ini sebenarnya Dapilnya Pak Boy ini. Pak Boy sering ngomong terus saya pergilah ke sana terbang saya lihat sendiri. Ada hotel Pak, di ujung *runway* itu,

ya mungkin Bapak-Bapak juga tahu itu. Memang saya *nggak ngerti* juga ini Pemda dulu mengizinkan dibangun di situ kan, jadi tidak terpelihara Pak KKOP nya, Kawasan Keamanan Operasional Penerbangan di bandara ini.

Tapi kemarin ketemu solusi Pak, di ujung landasan sebelahnya ada klinik ya itu sudah disepakati sama Bupati, saya ketemu Bupati, Ketua DPRD ya dengan Prokovinda Provinsi lah, kami ngobrol akhirnya disepakati malam itu, itu Pemda bebaskan klinik itu Pak, hanya memang *runway*-nya harus diperpanjang. Ini kalau tidak cepat kita tangani Pak Sekjen, kalau cuaca *ndak* bagus itu hotel berbahaya sekali, Pak.

Dia tidak dia hindari terlalu jauh, *runway*-nya *nggak* cukup Pak untuk mendarat, *nggak* cukup. Tidak dihindari bisa-bisa pesawat singgah di hotel *situ* Pak, *nginap* di hotel situ. *Nah*, kalau menurut saya Pak Sekjen, Pak Sesdirjen ini menurut saya urgent untuk cepat ditangani benar, ini sebelum terjadi sesuatu dan lain hal. *Nah*, kalau sudah terjadi apa-apa baru kita tangani pernah pula kita bicarakan di sini nanti *ndak* baik Pak.

Ya jadi saya rasa karena Pemdanya sudah siap ya, *ndak* ada cerita lain ini harus di cepat ditangani karena sisi sebelah ini sudah siap untuk mereka bebaskan. Saya bilang kemarin jangan bebaskan pembebasan itu ke Kementerian Perhubungan. *Nah*, kalau Pemda siap *monggo* silakan kita bicarakan nanti sama Kementerian.

Akhirnya disepakati mereka yang bebaskan lahannya untuk termasuk bangunan, bongkar bangunan dan seterusnya. Itu untuk yang Ketapang dan Singkawang seperti saya ulangi lagi tadi saya berharap ini selesai Pak, ya sebelum 2024 di Singkawang sudah bisa operasional.

Kemudian Kapuas Hulu Pak Pangsuma, Pak Sekjen tempo hari kita dengan Pak Menteri ke sana. Terminalnya saya pikir ya perlu kita perhatikanlah Pak ya. Ini Kabupaten luas Pak, penduduknya tidak terlalu banyak tapi ini kan berbatasan langsung dengan Malaysia. Ya, ini bandara ini juga untuk bandara tanggap darurat kalau bencana Pak, *nggak* ada pilihan lain, pasti kita dari sini dari bandara ini.

Sehingga bandara ini pun sudah kalau saya tidak salah Pak Jokowi saja sudah dua kali kalau *nggak* salah ke bandara ini ya mendarat di sini. Hanya memang sisi daratnya ini masih perlu perhatian, kalau sisi udaranya *sih* saya lihat masih masih cukup. Kalau landasan cukup hanya mungkin kita perlu, perlu *overlay* Pak, kita *overlay*.

Saya rasa itu saja barangkali kalau untuk Kalimantan Barat Pak tiga titik ini perlu mendapat perhatian dari kita semua. Saya rasa demikian Pak Ridwan, *nggak* usah dikasih jawab Bapak-Bapak ini Pak biar nanti jawab tertulis saja ini sudah hampir jam 5 Anggota pun tinggal. Ya, tergantung 3 Pimpinan ini kayanya sudah sepekat lah di sini.

Silakan Pak Ridwan.

**F- P. GOLKAR (Ir. RIDWAN BAE) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:**

Makasih Pak Ketua, jadi masuk saja pada kesimpulan langsung. Langsung kesimpulan tolong, kesimpulan.

**F – P. GOLKAR (Drs. HAMKA B. KADY, MS):**

Pak Ketua izin.

**F- P. GOLKAR (Ir. RIDWAN BAE) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:**

Ya silakan Pak.

**F – P. GOLKAR (Drs. HAMKA B. KADY, MS):**

Sebelum kesimpulan dulu.

**F- P. GOLKAR (Ir. RIDWAN BAE) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:**

Silakan.

**F – P. GOLKAR (Drs. HAMKA B. KADY, MS):**

Pak Sekjen saya inginkan itu data ya Pak ya, tolong datanya yang 2023 *item* apa yang kena pada *automatic adjustment* dari seluruh Dirjen, *eh* 2022, ya. Jadi datanya per-kedirjenan. Saya kira ada itu data sehingga memudahkan kita untuk mengevaluasi baik meninjau ke depan maupun mengevaluasi yang lalu, makasih.

**KETUA RAPAT:**

Makasih. Pak Dirjen, saya lupa tadi. Bukan Bapak tidak memberikan jawaban, tetap diberikan jawaban tertulis Pak ya semua dari Eselon I yang memberikan jawaban tertulis tapi tidak lagi menjawab secara lisan sekarang ini karena waktu kita sangat pendek.

Baik kesimpulan kita,

Draf Kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI Dengan Sekjen, Irjen, Kepala BPSDPMP, dan Kepala Badan Kebijakan Transportasi (BKT) Kementerian Perhubungan, 27 juni 2022.

1. Terkait dengan evaluasi pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2022 Komisi V DPR RI meminta Sekjen, Irjen, BPSDMP, Badan Kebijakan Transportasi dan Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan untuk meningkatkan penyerapan anggaran sesuai target penyerapan Tahun Anggaran Tahun 2022.
2. Komisi V DPR RI sepakat dengan Sekjen, Irjen, Kepala BPSDMP, Kepala BKT, dan Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan

untuk menyesuaikan rincian program dan penyempurnaan RKA/KL masing-masing Eselon I, dalam Nota Keuangan RAPBN Tahun Anggaran 2023, secara lebih konkrit sesuai dengan saran dan pendapat serta usulan Komisi V DPR RI yang disampaikan dalam rangkaian proses Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2023 dengan mengedepankan prinsip *good governance*.

3. Komisi V DPR RI meminta Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan untuk memaksimalkan dan memanfaatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2023.

Bagaimana Anggota dan Pimpinan setuju?

**(RAPAT: SETUJU)**

Setuju, bagaimana Pak dari Pak Sekjen, Pak Eselon I?

**SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI (IR. NOVIE RIYANTO RAHARDJO, MSEA):**

Setuju Bapak.

**KETUA RAPAT:**

Setuju, *toki*.

**(RAPAT: SETUJU)**

Baik, tepuk tangan dulu. Maka dengan selesainya dan disepakatinya kesimpulan pada kesempatan ini, kita beri kesempatan sambutan akhir, apa, sambutan akhir dan kata penutup dari Pak Sekjen langsung, silakan Pak.

**SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI (Ir. NOVIE RIYANTO RAHARDJO, MSEA.):**

Terima kasih Bapak Ketua, Para Wakil Ketua dan Anggota Komisi V yang sangat kami hormati.

Kami berterima kasih atas arahan dan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagaimana kita bisa melaksanakan fungsi anggaran baik itu di 2022 maupun di 2023. Kemudian atas pesan Bapak Pimpinan tadi juga bahwa semua jawaban akan kami sampaikan pada kesempatan pertama secara detail sesuai dengan apa harapan dari Bapak-Ibu Komisi V yang hadir pada hari ini. Berikan waktu kami untuk bisa menyelesaikan dan segera kami kirimkan Bapak.

Kemudian atas kesimpulan kami juga sangat mendukung, kami terus berharap agar Komisi V terus dapat bekerja sama dengan kita untuk sama-sama menyelesaikan pembangunan dan permasalahan-permasalahan

transportasi untuk saat ini dan ke depan. Terima kasih sekali lagi atas waktunya.

*Wabillahitaufik walhidayah,  
Wassalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

*Walaikumsalam.*

Demikianlah, rangkaian acara rapat pada hari ini. Telah kita selesaikan semoga hal yang telah kita diskusikan dan kita putuskan dapat bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

Saya atas nama Pimpinan Anggota Komisi V mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada kata yang terucap yang membuat Bapak kurang nyaman dalam menjalankan tugas ini. Tetapi, bahwa apa yang kita katakan adalah semua untuk kepentingan kita di saat-saat yang akan datang.

Maka rapat dengar pendapat pada hari ini dapat kita tutup dengan ucapan terima kasih dan *wassalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh.*

**(RAPAT DITUTUP PUKUL 16.00 WIB)**

**JAKARTA, 27 Juni 2022**

a.n. KETUA RAPAT  
SEKRETARIS RAPAT,

TTD

**NUNIK PRIHATIN BUDIASTUTI, S.H.**  
**NIP. 196912021998032002**